PENGARUH IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP) KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DI KABUPATEN BULUKUMBA

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Manajemen

Oleh:

FATMAWATI
2018MM11321

PROGRAM PASCASARJANA
STIE NOBEL INDONESIA
MAKASSAR
2020

PENGESAHAN TESIS

Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kabupaten Bulukumba

Oleh:

FATMAWATI

Telah dipertahankan di depan Penguji
Pada tanggal 06 November 2020
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :

Komisi Pembimbing

Ketua,	**Anggota,**
Dr. H. Muhammad Hidayat, SE, MM	**Dr. Andi Djalante, MM, M.Si**

Mengetahui :

Direktur PPS **STIE Nobel Indonesia,**	**Ketua Program Studi** **Magister Manajemen,**
Dr. Maryadi, S.E., M.M.	**Dr. Sylvia Sjarlis, S.E., M.Si., Ak., C.A.**

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI NOBEL INDONESIA
School Of Business

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (MAGISTER MANAJEMEN) ini dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, November 2020

Saya Ybs,

FATMAWATI

2018MM11321

MOTTO

‘‘ Barangsiapa belum merasakan pahitnya belajar

walau sebentar, ia akan merasakan hinanya kebodohan

sepanjang hidupnya’’.

(Imam Syafi’i)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan hidayah dan rahmat yang telah diberikan-Nya, sehingga Tesis ini yang berjudul **"Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Bulukumba"** dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini banyak mengalami kendala, namun berkat motivasi, bantuan, bimbingan, kerja sama dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi dapat diatasi.

Dengan segala kerandahan hati, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada setiap pihak yang terlibat. Baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyelesaian proposal ini, antara lain :

1. **Dr. H. Mashur Razak, S.E., MM** Selaku Ketua STIE Nobel Indonesia Makassar
2. **Dr. Maryadi, S.E., MM** Selaku Direktur PPS STIE Nobel Indonesia Makassar
3. **Dr. Sylvia Sjarlis, S.E., M.Si, Ak., CA** Selaku Ketua Prodi Magister Manajemen PPS STIE Nobel Indonesia Makassar
4. Bapak**Dr. H. Muhammad Hidayat, S.E., M.M** sebagai pembimbing I dan Bapak **Dr. Andi Djalante, MM., M.Si** selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran memberikan masukan, dukungan, saran dan kritik yang membangun untuk kelancaran penulisan tesis ini.

5. Selaku tim penguji yang telah memberikan banyak masukan untuk kesempurnaan tesis ini.
6. Bapak/Ibu Dosen beserta Staf PPS STIE Nobel Indonesia Makassar yang telah membantu selama proses perkuliahan sampai pada tahap penyelesaian penyusunan Tesis ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Manajemen PPS STIE Nobel Indonesia Makassar, atas kebersamaan yang dilaui bersama penuh suka cita.
8. Orang tua dan keluarga yang selama ini memberikan dukungan moral, semangat serta dukungan doa sehingga penilis dapat menyelesaikan Tesis ini.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutan satu persatu.

Sebagai seorang manusia yang selalu diliputi kekurangan, penulis menyadari bahwa Tesis ini terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Oleh karenanya, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan Tesis ini.

Bulukumba, November 2020

Penulis

ABSTRAK

Fatmawati. 2020. Pengaruh Implememntasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Bulukumba, dibimbing oleh Muhammad Hidayat dan Andi Djalante.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, kompetensi SDM dan Teknologi Informasi secara parsial dan simultan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan di Kabupaten Bulukumba, (2) variabel yang paling berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan di Kabupaten Bulukumba.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba dengan mengambil 58 responden pada Kepala sub bagian Anggaran dan Bendahara di 29 SKPD di Kabupaten Bulukumba.

Hasil penelitian menunjukkan (1) terdapat pengaruh positif dan signifikanImplementasi SAP, Kompetensi sumber daya manusia, dan Informasi Teknologi secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel implementasi SAP, kompetensi sumber daya manusia dan teknologi informasi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan di Kabupaten Bulukumba (2) variabel yang paling berpengaruh (dominan) yaitu variabel kompetensi sumber daya manusia dengan nilai koefisien determinasi sebesar 73,9%.

Kata Kunci: *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi SDM, Teknologi Informasi, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan*

ABSTRACT

Fatmawati. 2020. *The Effect of Implementation of Government Accounting Standards (SAP) Human Resources and Information Technology Competence on the Quality of Financial Statements in Bulukumba Regency, supervised by Muhammad Hidayat and Andi Djalante.*

This study aims to determine (1) the effect of the implementation of Government Accounting Standards, HR competence and Information Technology partially and simultaneously on the quality of Government financial reports in Bulukumba Regency, (2) the variables that most influence the quality of government financial reports in Bulukumba Regency.

This research was conducted in Bulukumba Regency by taking 58 respondents from the Head of the Budget and Treasury subdivision in 29 SKPDs in Bulukumba Regency.

The results showed (1) there was a partially positive and significant effect of SAP Implementation, Human Resource Competence, and Information Technology on the Quality of Financial Statements in Bulukumba Regency. This study also shows that the SAP implementation variable, human resource competence and information technology simultaneously affect the quality of government financial reports in Bulukumba Regency (2) the most influential (dominant) variable is the human resource competency variable with a coefficient of determination of 73, 9%.

Keywords: *Implementation of Government Accounting Standards, HR competence Information Technology, Quality of Government Financial Reports*

DAFTAR ISI

SAMPUL i
MOTTO ii
PENGESAHAN TESIS iii
KATA PENGANTAR iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS vi
SURAT KETERANGAN LOA vii
ABSTRAK viii
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
BAB I PENDAHULUAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.1 LATAR BELAKANG ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.2 RUMUSAN MASALAH ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.3 TUJUAN PENELITIAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.4 MANFAAT PENELITIAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB II KAJIAN PUSTAKA ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.2.1 Manfaat dan Tujuan Standar Akuntansi ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.2.2 Indikator Pengukuran Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.3 Kualitas Laporan Keuangan ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.4 Kompetensi SDM ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.5 Teknologi Informasi ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.6 Pengertian Kualitas Laporan pertanggung jawaban ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.7 Pengelolaan Keuangan Derah ..... **Error! Bookmark not defined.**

BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN..... **Error! Bookmark not defined.**

3.1 Kerangka Konsep Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

3.2 Hipotesis .....**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV METODE PENELITIAN .....**Error! Bookmark not defined.**

4.1 Jenis Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....**Error! Bookmark not defined.**

4.3 Populasi dan Sampel .....**Error! Bookmark not defined.**

4.4 Teknik Pengumpulan Data.....**Error! Bookmark not defined.**

4.5 Jenis dan Sumber Data.....**Error! Bookmark not defined.**

4.6 Analisis Data .....**Error! Bookmark not defined.**

4.6. Uji Instrumen Penelitian .....**Error! Bookmark not defined.**

4.6.2 Analisa Regresi Linier Berganda ...**Error! Bookmark not defined.**

4.6.3 Uji Koefisien Determinasi .....**Error! Bookmark not defined.**

4.7 Uji Hipotesis .....**Error! Bookmark not defined.**

BABV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.... **Error! Bookmark not defined.**

5.1 Gambaran Umum.....**Error! Bookmark not defined.**

5.2 Hasil Penelitian .....**Error! Bookmark not defined.**

5.2.1 Identitas Respoden .....**Error! Bookmark not defined.**

5.2.2 Analisis Persepsi Responden Terhadap Variabel Penelitian . **Error! Bookmark not defined.**

5.2.3 Uji Validitas dan Realibitas .....**Error! Bookmark not defined.**

5.2.4 Uji Analisis Regresi Linear Berganda ..... **Error! Bookmark not defined.**

5.2.5 Pengujian Hipotesis .....**Error! Bookmark not defined.**

5.3 Pembahasan Hasil Penelitian .....**Error! Bookmark not defined.**

BABVI KESIMPULAN DAN SARAN .....**Error! Bookmark not defined.**

6.1 Simpulan .....**Error! Bookmark not defined.**

6.2 Saran-saran.....**Error! Bookmark not defined.**

6.3 Keterbatasan Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR TABEL

Tabel2.1	Hasil Penelitian Sebelumnya	16
Tabel 5.1	Sebaran Responden Menurut Jenis Kelamin	86
Tabel 5.2	Sebaran Responden Menurut Kelompok Umur	87
Tabel 5.3	Sebaran Responden Menurut Tingkat Pendidikan	88
Tabel 5.4	Hasil analisis deskriptif variabel X1	90
Tabel 5.5	Hasil analisis deskriptif variabel X2	92
Tabel 5.6	Hasil analisis deskriptif variabel X3	94
Tabel 5.7	Hasil analisis deskriptif variabel Y	95
Tabel 5.8	Hasil Uji (VAlidasi) Item Variabel	98
Tabel 5.9	Uji Reliabilitas Masing-Masing Variabel.....	99
Tabel 5.10	Hasil Perhitungan Regresi	101
Tabel 5. 11	Hasil Uji t	103
Tabel 5.12	Hasil Uji F	109
Tabel 5. 13	Hasil Uji Beta	111
Tabel 5.14	Hasil Uji Determinasi	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diketahui bahwa pada era tahun 1998 terjadi Perubahan besar bagi penyelnggaraan Pemerintahan di Indonesia. Dan pada masa itu dibawah pemerintahan yang baru berusaha melakukan penyempurnaan-penyempurnaan diberbagai bidang satu diantaranya dilakukan perbaikan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan pelaksanaan pemerintahan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah menjadi awal babak baru bagi kehidupan bernegara di Indonesia dan sekaligus menjadi tonggak penyempurnaan penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia.

Otonomi daerah Yang dimaknai sebagai upaya yang dilakukan dalam rangka pelimpahan fungsi,tugas,dan atautanggungjawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentu membawa perubahan besarbagi tata penyelenggaraan pemerintahan didaerah, khususnya dalam kaitannya denga nmasalah sumber-sumber keuangan yang akan digunakan pemerintah daerah

dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pemerintah pusat yang dilimpahkan dan didelegasikan kepadanya.

Sejak dilaksanakannya desentralisasi yang diwujudkan dengan pemberian fungsi dan tanggungjawab kepada daerah propinsi, kabupaten dan kota, mak asesuai dengan prinsip *"moneyfollowfunction"* dimana yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pemerintahan. Kemudian disebabkan oleh adanya pengalihan dan penyerahan sebagian tugas serta wewenang yang semula menjadi urusan pemerintah pusat kepada daerah, maka timbul pula konsekuensi logis bagi pemerintah pusat untuk mengalokasikan sebagian sumber pendanaan atau pembiayaan ke daerah. Adapun dasar-dasar pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut didasarkan pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan yang secara formal di atur dengan ditetapkannya UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip "*money follow function*" dan ketentuan tentang dana perimbangan diatas, dengan semakin banyaknya dana yang harus dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah yang merupakan bentuk dukungan sistem pengelolaan keuangan. Satu hal penting yang lain dari konsekuensi tersebut, ialah berkaitan dengan wujud komitmen pemerintah dalam menjawab tuntutan masyarakat yang menghendaki agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara lebih baik, maka kemudian pemerintah mengeluarkan paket kebijakan atau peraturan dalam upaya

mewujudkan agar pengelolaan keuangan negara dan daerah dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan menggunakan tiga pilar utama, yaitu: transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Hal ini penting dilakukan mengingat bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah yang buruk selama masa orde baru telah memunculkan maraknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu, terwujudnya sistem pengelolaankeuangan daerah yang baik mutlak diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan dana desentralisasi secara transparan,ekonomis,efisien, dan akuntabel serta mampu mendorong partisipasi aktif dari masyarakat.

Adapun salah satu peraturan yang bertalian dengan hal dimaksudkan diatas adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang saat ini telah direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59T ahun 2007. Melalui peraturan – peraturan ini, maka terjadi beberapa perubahan dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah. Salah satunya adalah dengan mulai diaplikasikannya standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan tersebut, sistem pengelolaan keuangan disektor pemerintahan diharapkan dapat dikelola dengan lebih transparan dan akuntabel, serta mengedepankan partisipasi aktif masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Pengaplikasian standar akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut terutama tampak dalam pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dimana sebelumnya yaitu dengan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 laporan pertanggungjawaban akhir tahun hanya berupa laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, laporan aliran kas, dan neraca daerah,maka dengan Permendagri 13 Tahun 2006, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APBD,neraca daerah, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai SAP.

Disamping hal tersebut di atas, dengan lahirnya Permendagri 13 Tahun 2006, selain diharapkan akan terjadi perubahan dalam pengelolaan keuangan yanglebih transparan lewat penerapan standar akuntansi pemerintahan, perubahan yang muncul melalui Permendagri 13 Tahun 2006 tersebut juga mencakup desentralisasi sistem akuntansi dan keuangan,di manadengan peraturan tersebut mulai diberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam mengelola keuangannya sendiri. Hal ini berbeda dengan praktek pengelolaan keuangan sebelumnya yang didasarkan pada Kepmendagri 29 Tahun 2002, dimana pengelolaan keuangannya dilakukan secara terpusat, yakni hanya di Biro Keuangan/Badan Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah. Pemberian peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepada SKPD (Satuan Perangkat Kerja Daerah) tersebut antara lain tampak pada sistem pembayaran dan

pengeluaran dana, dalam hal pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran, serta dalam hal pelaporan keuangan.

Seiring dengan reformasi manajemen keuangan pemerintah, pengelolaan keuangan di Indonesia saat ini telah mengalami banyak perubahan dan perbaikan. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah beberapa kali terkhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Perubahan mendasar dari peraturan ini adalah adanya pemisahan fungsi ordonatur dan fungsi perbendaharaan. Fungsi ordonatur dilaksakan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), sementara fungsi perbendaharaan dilaksanakan oleh badan/biro/dinas yang khusus mengelola keuangan daerah. Perubahan mendasar lainnya adalah penegasan bahwa bendahara sebagai pejabat fungsional. Bendahara merupakan jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, harus berdasarkan pada Permendagri No 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada pemerintah daerah. Halim dan Kusufi (2012) menyatakan bahwa penerapan basis akrual memberikan hasil yang lebih baik dan menguntungkan dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang akuntabel. Sistem

Akuntansi Keuangan Daerah harus tetap berpegang pada prinsip -prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik. Soleh dan Rochmansjah (2010) mengungkapkan bahwa prinsip dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sangat diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah, meliputi : (1) akuntabilitas; (2) *Value for money*; (3) Kejujuran dalam mengelola keuangan publik; (4) transparansi; dan (5) Pengendalian.

Kondisi yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggunjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara-cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat.

Pada dasarnya Pemerintah Daerah telah berupaya untuk menyusun laporankeuangan dengan menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang diharapkan mampu mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas. Disisi lain, adanya suatu sistem yangkurang baik akan berdampak pada buruknya kualitas informasi laporan keuangan daerah yang

mengindikasi adanya penyimpangan dan kekeliruan di bidang keuangan, sehingga dapat menimbulkan kerugian negara/daerah. Hal ini menjadi suatu tantangan bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas kinerja keuangannya dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan yang tercermin melalui opini auditor.

Selain penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, keberadaan sumber daya manusia (dalam hal ini aparatur pemerintah daerah) juga berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas laporan keuangan. Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang yang melekat pada manusia itu sendiri dalam arti dapat ditunjukkan dalam hal wewenang, dan tanggungjawab yang memiliki kemampuan *(Competency)*, yaitu : Pengetahuan *(knowledge)*, keterampilan *(Skill)*, dan sikap perilaku *(Attitude)* yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Sedarmayanti (2014:286).

Kemampuan dan keahlian untuk mencapai hasil yang optimal merupakan suatu cara dalam meningkatan akuntabilitas keuangan daerah, sehingga dapat ditarik satu benang merah bahwa kualitas aparatur pemerintah daerah berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas keuangan daerah. Dengan adanya aparatur pemerintah yang kompeten/profesional, diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan juga berkualitas. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan Keuangan dikatakan

berkualitas jika memenuhi empat karakteristik kualitatif yakni relevan, andal, dapat dibandingkan; dan dapat dipahami. Selain Sumber Daya Manusia (SDM), sarana pendukung dalam pengimplementasian Standar Akuntansi Pemerintahan berbais Akrual adalah sarana pendukung seperti *software, hardware* dan jaringan serta insentif pegawai. Tentunya dalam suatu implementasi kebijakan akan ada kendala ataupun tantangan yang terjadi.

Menurut Binsar Simanjuntak (2010), beberapa tantangan dalam implementasi akuntansi berbasis akrual memerlukan sistem akuntansi dan IT *bases system* yang lebih rumit. Lemahnya komitmen pimpinan, kebutuhan akan SDM yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan, dan adanya resistensi terhadap perubahan dari pihak internal instansi pemerintahan. Maka dari itu, pegawai pemerintahan di tuntut untuk ahli dalam memahami serta mengoperasikan teknologi informasi.

Menurut Indriasari dan Ertambang (2008) dalam Nyoman Triyadi (2016), teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Hal ini menunjukan bahwa teknologi informasi dapat memberikan manfaat guna membantu pegawai dalam menyelesaikan laporan keuangan dengan mudah dan aman sebab data dapat tersimpan dalam satu tempat dan dapat disesuaikan dengan format Standar Akuntansi Pemerintahan.

Keberhasilan atau kegagalan penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah tidak lepas dari peran satuan kerja dan pengaruh dari faktor-faktor yang ada pada satuan kerja tersebut, mulai dari faktor sumber daya manusia seperti tinkat pendidikan staf, pelatihan yang diberikan dan tender dan privatisasi perusahaan publik (Mardiasmo 2002 dalam Fenty Herlina, *et al* 2016). Jika penerapan masih belum memadai dan berhasil dilakukan dengan benar maka tujuan pemerintah menggunakan metode akrual tidak akan menghasilkan manfaat yang diinginkan yaitu pengambilan keputusan melalui informasi keuangan yang tersaji dengan relvan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami sesuai dengan PP 71 Tahun 2010. Pelaporan kinerja pemerintah melalui laporan keuangan merupakan wujud dari proses akuntabilitas (Mahsun et.al, 2009). Pelaporan tersebut diserahkan ke masyarakat secara umum dan Dewan erwakilan Rakyat (DPR), sehingga masyarakat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (*users*) bisa menerima informasi yang lengkap dan tajam tentang kinerja program pemerintah serta unitnya Mardiasmo (2002) dalam Fenty Herlina, *et al. (2016)*. Oleh karena itu pemerintah sangat mengupayakan kesuksesan dari implementasi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 demi kelancaran dan kemanfaatan yang nyata bagi seluruh komponen sektor publik.

Dengan demikian pemerintah daerah seharusnya meningkatkan kualitas laporan keuangan agar mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap

tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari auditor. Menurut Peraturan BPK No.1 Tahun 2017 Tentang Standard Pemeriksaan Keuangan Negara menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab terhadap laporan keuangan. Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional auditor mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan. Dalam hal ini diperlukan kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Ketika auditor memberikan opini WTP terhadap LKPD, laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

Beberapa penelitiaan yang telah dilakukan terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruh kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan Riandani (2017) tentang "Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (SKPD Kab.Limapuluh Kota)" hasil penelitian menunjukkan kompetensi SDM dan pengendalian intern memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan kuangan Kab. Limapuluh Kota. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, dkk (2018) tentang "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan" hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi standar akuntansi pemerintah, utilisasi teknologi informasi, dan sistem

kontrol intern secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mahaputra dan Putra (2014) tentang "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah" hasil penelitian menunjukkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern, dan implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di SKPD Kabupaten Gianyar. Penelitian yang dilakukan oleh Juwita (2013) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang merupakan salah satu pemerintah daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan juga menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba adalah berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kerangka konseptual dalam Lampiran Peraturan Bupati ini merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba, dengan tujuan sebagai acuan bagi:Penyusun standar dalam melaksanakan tugasnya, Penyusun Laporan

Keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum dan atau belum cukup diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah Laporan Keuangan disusun sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulukumba, dan Para pengguna Laporan Keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

Secara mendasar kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Bulukumba. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Kerangka Konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Bulukumba, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah dan badan layanan umum.

Tahun 2020 Kabupaten Bulukumba telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini audit tersebut telah diperoleh secara berturut-turut yaitu tahun 2012 sampai dengan tahun 2020 atas laporan keuangan daerah. Pemberian opini WTP dari BPK tersebut karena LKPD Kabupaten Bulukumba dianggap telah memperhatikan kesesuaian SAP, kecukupan pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi menurut Sukri Sappewali selaku Bupati Kabupaten Bulukumba, walaupun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD untuk tahun 2020 mendapatkan opini WTP, namun tetap masih ada beberapa temuan dan rekomendasi dari BKP RI perwakilan Sulawesi Selatan.Seperti di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba setiap tahunnya sering didapatkan temuan yang berulang. Hampir setiap tahun pemeriksaan oleh Badan Pemriksa Keuangan menemukan Surat Pertanggungjawaban yang tidak lengkap, kegiatan yang dilakukan pada awal tahun tapi baru memasukkan pertanggungjawabannya di pertengahan tahun, serta temuan pajak yang hamper setiap tahun terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun tesis dengan judul : "***Pengaruh Implementasi Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi dan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Bulukumba"***.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Bedasrakan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat disajikan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, kompetensi SDM dan Teknologi Informasi berpengaruh secara parsial (sendiri-sendiri) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan di Kabupaten Bulukumba ?
2. Apakah implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, kompetensi SDM dan Teknologi Informasi berpengaruh secara simultan (Bersama-sama) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan di Kabupaten Bulukumba?
3. Variabel apa diantara implementasi SAP, Kompetensi SDM dan Tekhnologi Informasi yang paling dominan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah di Kabupaten Bulukumba?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis pengaruh implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, kompetensi SDM dan Teknologi Informasi secara sendiri-sendiri (parsial) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan di Kabupaten Bulukumba.
2. Untuk menganalisispengaruh implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan, kompetensi SDM dan Teknologi Informasi secara

bersama-sama (simultan) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan di Kabupaten Bulukumba.

3. Untuk menganalisis Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah di Kabupaten Bulukumba.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat yang berarti, antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberi tambahan informasi yang bermanfaat sebagai pertimbangan dalam meningkatkan kinerja pegawai dan lebih produktif, efektif dan efisien.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk menentukan kebijakan yang tepat di bidang pengeloaan keuangan daerah, guna mengatasi permasalahan pertanggungjawaban penggunaan APBD.

b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penulisan penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang akan mengarahkan penulisan ini, diantaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Loli Efendi dan Darwanis (2017) dengan judul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah (studi pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah). Teknik analisis data menggunakan analisis regresi sederhana. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan daerah di Kab Aceh Tengah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2015) dengan judul Pengaruh Penerapan Standar AkuntansiPemerintah (SAP), Pengetahuan Pengelola, Dan Ketersediaan Sarana Prasarana Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD di Kabupaten Kuantan Singingi). Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa standar akuntansi pemerintah, pengetahuan pengelola, dan ketersediaan sarana prasana berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada SKPD Kabupaten Kuantan singing.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Desianawati (2014) dengan judul Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sitem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa kompetensi SDM, penerapanSAP, dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikann terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2013) dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual). Teknik analisis data menggunakanan alisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kota Tual.

Penelitian yang dilakukan oleh Tantriani Sukmaningrum (2012) dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Semarang). Teknik analisis data yang digunakan*l inier regression*. Sistem Pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadapkulitas laporan keuangan pemerintah daerah.Sedangkan kompetensiSDM dan faktor eksternal tidak signifikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Penelitian	Judul	Persamaan dan Perbedaan	Metode	Hasil Penelitian
1	Loli Efendi dan Darwanis (2017)	Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah (studi pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tengah)	**Persamaan:** • Kualitas Laporan Keuangan **Perbedaan:** • Pada Satuan Kerja Perangkat Kab Aceh Tengah • Kualitas aparatur daerah • Pemanfaatan teknologi • Pengawasan keuangan	Analisis Regresi Linier Berganda	Kualitas aparaturdaerah , pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan daerahdi Kab AcehTengah
2	Dewi Sartika (2015)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pengetahuan Pengelola, Dan Ketersediaan Sarana Prasarana Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD di Kabupaten Kuantan Singingi)	**Persamaan:** • Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) • Pengetahuan Pengelola Kualitas Laporan Keuangan **Perbedaan**: • Ketersediaan Sarana Prasarana Pada SKPD di Kabupaten Kuantan Singingi	Analisis Regresi Linier Berganda	Standar Akuntansi Pemerintah, Pengetahuan Pengelola,Dan Ketersediaan Sarana Prasana Berpengaruh Tidak Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah DaerahPada SKPD Kabupaten Kuantan Singing.

No	Penelitian	Judul	Persamaan dan Perbedaan	Metode	Hasil Penelitian
3	Kadek Desianawati dan Trisna Herawati(2014)	Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sitem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	**Persamaan:** Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Kualitas Laporan Keuangan **Perbedaan:** Kompetensi SDM Sistem Akuntansi Keuangan Daerah SKPD Kabupaten Kuantan singing.	Analisis Regresi Linier Berganda	Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan daerah berpengaruh Signifikann terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah
4	Kartika, Daniel Dan Suhardjo, Yohanes (2013)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual)	**Persamaan:** Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Kualitas Laporan Keuangan **Perbedaan:** Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Pada Pemerintah KotaTual	Analisis Regresi Linier Berganda	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahn danKualitas Aparatur Pemerintah Daerah Berpengaruh Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Tual
5	Tantriani Sukmaningrum (2012)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada	**Persamaan:** Kualitas Laporan Keuangan **Perbedaan:** Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota	Analisis Koefesien Korelasi	SistemPengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kulitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan

No	Penelitian	Judul	Persamaan dan Perbedaan	Metode	Hasil Penelitian
		Pemerintah Kabupaten Dan Kota Semarang)	Semarang Sistem pengendalian intern Kompetensi SDM Faktor eksternal		kompetensi SDM dan faktor eksternal tidak signifikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

2.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintah merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tatakelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan (Mahmudi, 2016:271). Penerapan Standar Akuntansi (SAP) diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan dipemerintah yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparansi serta akuntabilitas (Nordiawan, 2012:23).

Menurut Suwanda (2015:8) standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Menurut Bastian (2013:138) standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintah berlaku untuk pemerintah pusat dan daerah diperlukan dalam rangka memenuhi transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas laporan

keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 22 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur perlunya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban keaungan pemerintah pusatdan daerah (Windyaningrum, 2010) Standar akuntansi berguna bagi penyusun laporan keuangan dalam menentukan informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Terdapat banyak pihak yang berkepentingan dengan standar akuntansi pemerintahan antara lain penyaji laporan keuangan, auditor, organisasi profesi akuntansi, akademisi, dan pemerintah (Mahmudi, 2016:271).

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat/daerah (Ubaidah, 2017) berupa:

a. Laporan Realisasi Anggaran
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
c. Neraca
d. Laporan Arus Kas
e. Laporan Operasional
f. Laporan Perubahan Ekuitas
g. Catatan atas Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Indonesia dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Perundangan terkait standar akuntansi pemerintahan diIndonesia, yaitu PPNo.71 Tahun 2010

tentang StandarAkuntansi Pemerintahan (SAP).PPNo.71 Tahun 2010 merupakan pengganti dari peraturan standar akuntansi lama dalam PP No.24 Tahun 2005. PP No.24 Tahun 2005 masih menggunaka nbasis pencatatan kas menuju akrual (*cashtowards accrual*) sedangkan PPNo.71 tahun 2010 yang ada saat ini menggunakan bass pencatatan akrual penuh (*full accrual*).

Dariuraian pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penerapan SAP, maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (Relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan). Laporan keuangan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para *stakeholder* antara lain: pemerintah,DPR/DPRD,investor,kreditur,dan masyarakat dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara.

2.2.1 Manfaat dan Tujuan Standar Akuntansi

Standar akuntansi pemerintahan berisi prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pada organisasi pemerintahan. Menurut Mahmudi (2011:271) beberapa manfaat standar akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut:

a. Standar akuntansi digunakan oleh akuntan keuangan dipemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.

b. Standar akuntansi digunakan oleh auditor sebagai kriteria untuk menentukan baik buruknya laporan keuangan yang disajikan.
c. Standar akuntansi digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan informasi yang ada didalam laporan keuangan.
d. Standar akuntansi diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalah laporan keuangan.
e. Standar akuntansi menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi sebab keluaran sistem akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi.

Menurut Bastian(2013:138) tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah."

2.2.2 Indikator Pengukuran Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Menurut Bastian (2013:140) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang pengukuran Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagaiberikut:

a. Basis Akrual. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban,maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.

b. Komponen laporan keuangan. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetaryreports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

   1) Laporan realisasi anggaran.
   2) Laporan perubahan saldo anggaran lebih.
   3) Neraca.
   4) Laporan operasional.
   5) Laporan arus kas.
   6) Laporan perubahan ekuitas.
   7) Catatan ataslaporan keuangan.

c. Periode Pelaporan. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasiberikut:

   1) Alasan penggunaan periodepelaporan tidak satu tahun.
   2) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dancatatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

2.3 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Harahap (2016: 105) laporan keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau

jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang dikenal adalah Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Modal dan Catatan atas Laporan Keuangan. Menurut Fahmi (2013: 2) laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh instansi yang bersangkutan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012: 5) mengemukakan bahwa: "Pengertian laporan keuangan adalah struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (*financial position*), kinerja keuangan (*financial performance*), dan arus kas (*cash flow*), dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya".

Bastian (2013: 9) menyatakan bahwa: "Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan". Sementara menurut Mahmudi (2013: 143) menyatakan bahwa: "Laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan".

Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan

keuangan pemerintah yang berguna (*useful*) memiliki makna laporan keuangan tersebut memuat isi informasi (*information content*). Laporan keuangan akan berguna (*useful*) apabila laporan keuangan tersebut memenuhi standar kualitatif (Suhardjo, 2013:97).

2.4 Kompetensi SDM

Kompetensi merupakan karakteristik pengetahuan, keterampilan perilaku, dan pengalaman untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau peran tertentu secata efektif. Kompetensi SDM merupakan factor terpenting dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas karena yang menerapkan SPIP dan SAP adalah manusia (Indriasih,2014). Kualitas SDM berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, karena semakin baik kualitas SDM maka semakin baik pula keterandalan pelaporan keuagan pemerintaha daerah (Anggraeni dan Riduwan, 2014). Dapat disimpulkan bahwa Kompetensi SDM menjadi hal utama yang harus diperhatikan dalam pengimplementasian SAP berbasis akrual sebab SDM merupakan pengendalian atas segala komponen yang mendukung berjalannya pengimplementasian tersebut.

2.4.1 Dimensi dan Indikator Kompetensi

Beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi menurut Gordon dalam Sutrisno (2011:204) sebagai berikut:

a. Pengetahuan *(knowledge)*

   Kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya seorang karyawan mengetahui cara melakukan identifikasi belajar dan bagaimana

melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada dengan efektif dan efisien di perusahaan.

b. Pemahaman *(understanding)*

Kedalam kognittif dan afektif yang dimiliki individu. Misalnya seorang karyawan dalam melaksanakan pembelajaran harus mempunyai pemahaman yang baik tetang karakteristik dan kondisi secara efektif dan efisien.

c. Kemampuan/Keterampilan (*skill*)

Sesuatu yang dimiliki oleh individu yang melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya, kemampuan karyawan dalam memilih metode kerja yang dianggap lebih efektif dan efisien.

d. Nilai *(value)*

Suatu standar perilaku yang telah ditakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya, standar perilaku para karyawan dalam melaksanakan tugas (kejujuran, keterbukaan, demokratis dan lain-lain).

e. Sikap *(attitude)*

Perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya, reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji dan sebagainya.

f. Minat *(interest)*

Kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya, melakukan sesuatu aktivitas tugas.

Sumber daya manusia dapat tetap bertahan karena mereka memiliki kompetensi manejerial, yaitu kemampuan untuk merumuskan visi dan strategi perusahaan serta kemampuan untuk memperoleh dan mengarahkan sumber daya lain dalam rangka mewujudkan visi dan menerapkan strategi perusahaan (Sutrisno, 2011:205).

Berikut adalah dimensi-dimensi kompetensi, namun dimensi kompetensi dalam penelitian ini meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan kinerja pegawai.

2.5 Teknologi Informasi

Organisasi dalam mencapai suatu tujuan tertentu membutuhkan suatu pengendalian intern yang di dalamnya dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan teknologi informasi (Afriyanti, 2011). Suatu teknologi informasi terdiri dari perangkat keras (*Hardware)*, perangkat lunak (*Software)*, manajemen data dan jaringan (Wilkinson *et al, 2000).* Hal ini menjelaskan bahwa teknologi informasi merupakan sarana pendukung atas tujuan organisasi. Dalam penelitian ini organisasi yang diteliti adalah organisasi sektor publik yang didalamnya menggunakan teknologi informasi sebagai sarana pendukung dalam menyajikan laporan keuangan pemerintahan.

Walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kos pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing* (Wahana Komputer, 2003), namun pengimplementasian teknologi informasi memerlukan biaya yang tidak murah. Terlebih lagi apabila teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal.

Kendala penerapan teknologi informasi antara lain terkait dengan kondisi perangkat keras (*hardware)* yang belum memadai, perangkat lunak (*software)* yang digunakan, kondisi sumber daya manusia yang belum mampu mengaplikasikan teknologi, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang dapat menjadi faktor yang membuat pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini mungkin juga memiliki pengaruh terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang diatur dalam PP 71 Tahun 2010. Hal ini menandakan bahwa teknologi informasi dapat bermanfaat untuk mendorong kesuksesan dari tujuan organisasi pemerintah. Selain itu, dengan adanya teknologi informasi tentunya pekerjaan untuk menyelesaikan penyusunan laporan keuangan akan lebih mudah dan cepat. Pada akhirnya pengambilan keputusan pun tidak

memakan waktu lama dan tentunya dasar informasi yang tersaji untuk pengambilan keputusan sudah ternilai handal.

2.5.1 Tujuan dan Fungsi Teknologi Informasi

Teknologi informasi dewasa ini menjadi hal yang sangat penting karena sudah banyak organisasi yang menerapkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan organisasi. Penerapan teknologi informasi pada tiap perusahaan atau organisasi tentunya memiliki tujuan yang berbeda karena penerapan TI pada suatu organisasi adalah untuk mendukung kepentingan usahanya. Adapun yang menjadi tujuan dari adanya teknologi informasi menurut Sutarman (2012: 17) adalah sebagai berikut :

"Untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam melakukan pekerjaan". Sedangkan Fungsi Teknologi Informasi menurut Sutarman (2012: 18) ada enam fungsi, yaitu

a. Menangkap *(Capture)*
b. Mengolah *(Processing)*
c. Menghasilkan (*Generating)*
d. Menyimpan *(Storage)*
e. Mencari kembali *(Retrieval)*
f. Mengolah (*Transmission*)

Fungsi – fungsi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Menangkap (*Capture*)

Menangkap yang dimaksudkan dalam teknologi informasi ini adalah teknologi informasi mampu menangkap semua data baik *input* maupun *output.*

b. Mengolah (*Processing*)

Mengkompilasikan catatan rinci dari aktivitas, misalnya menerima input dari *keyboard,scanner,mic* dan sebagainya. Mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan/pemrosesan data dapat berupa konversi (pengubahan data kebentuk lain), analisis (analisis kondisi), perhitungan (kalkulasi), sintesis (penggabungan) segala bentuk data dan informasi.

1) Data *processing*, memproses dan mengolah data menjadi suatu informasi.
2) *Information processing*, suatu aktivitas computer yang memproses dan mengolah suatu tipe/bentuk dari informasi dan mengubahnya menjadi tipe/bentuk yang lain dari informasi.
3) Multimedia sistem, suatu sistem komputer yang dapat memproses berbagai tipe/bentuk dari informasi secara bersamaan (simultan).

c. Menghasilkan (*Generating*)

Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna. Misalnya : laporan, tabel, grafik dan sebagainya.

d. Menyimpan (*Storage*)

Merekam atau menyimpan dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya disimpan ke *harddisk, tape,disket, compact disc* (CD) dan sebagainya.

e. Mencari kembali (*Retrieval*)

Menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menyalin (*copy*) datadan informasi yang sudah tersimpan, misalnya mencari supplier yang sudah lunas dan sebagainya.

f. Transmisi (*Transmission*)

Mengirimkan data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalnya mengirimkan data penjualan dari *user* A ke *user* lainnya dan sebagainya.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa teknologi informasi memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda bagi suatu perusahaan dan itu semua tergantung pada bidang usaha masing-masing perusahaan.

2.6 Pengertian Kualitas Laporan pertanggung jawaban

Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan. Kualitas laporan pertanggungjawaban yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan pertanggungjawaban untuk keperluan perencanaan, pengendalian,

dan pengambilan keputusan. Informasi keuangan di dalam laporan pertanggung jawabab harus dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas untuk para pemimpin (kepala daerah dan para pejabat Pemerintah Daerah) ketika mereka bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola.
2. Meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah, pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas.
3. Memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban.
4. Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

2.6.1 Prinsip prinsip Standar Akuntansi Pemerintah dalam Laporan Pertanggung Jawaban

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatan, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Menurut Peraturan Pemerintah R.I Nomor 71Tahun 2010 berikut ini adalah prinsip-prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah :

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan, beban,aset, kewajiban,dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikan laporan keuangan denganbasis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

b. Nilai Historis (Historical Cost)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kasyang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

c. Realisasi (Realization)

Bagi pemerintah, pendapatan basis kasyang tersedia yang telah di otorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah di otorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain disebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitas. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atasLaporan Keuangan.

e. Periodisitas (Periodicity)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumberdaya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Full disclosure (Prinsip Pengungkapan penuh)

Prinsip pengungkapan penuh (full disclosure principle) atau prinsip keterbukaan adalah menyajikan semua informasi dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi pemahaman pembaca. Kata disclosure memiliki arti tidak menutupi atau tidak menyembunyikan (Ghozali dan Chariri, 2007).Bila dikaitkan dengan pengungkapan informasi, disclosure mengandung pengertian bahwa pengungkapan informasi tersebut harus lengkap, jelas, akurat, dan dapat dipercaya. Pengungkapan penuh (full disclosure) harus mengungkapkan :

1) Data keuangan dan non keuangan.

   Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) laporan keuangan bagian dari proses pelaporan yang lengkap,meliputi neraca, laporan rugi - laba, laporan perubahan posisi keuangan (arus kas atau arus dana,catatan dan laporan lain), serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral darinya. Sedangkan non keuangan adalah sebuah kejadian yang diproses oleh sistem informasi menajemen yang memiliki makna luas dan pada transaksi keuangan umpamanya peristiwa penadatanganan kesepakatan kerja sama (MOU).

2) Analisis data keuangan dan non keuangan.

   Analisis data keuangan adalah laporan keuangan yang menguraikan berbagai pos yang ada didalam laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih baik dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang memiliki makna antara satu dengan yang lain, baik data kwantitatif maupun kwalitatif.

3) Informasi yang berorientasi pada perencanaan anggaran dan pelaporan.

   Bahwa informasi perencanaan, penganggaran dan pelaporan ini dikembangkan dengan tujuan mendukung pemerintah daerah baik secara operasional maupun manejerial dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, sesuai dengan sistem penyelenggaraan yang berlaku.

4) Catatan atas laporan keuangan, mengenai kebijakan akuntansi dan catatan- catatan umum.

Catatan Atas Laporan Keuangan atau biasa disebut dengan CALK merupakan informasi lebih rinci mengenai detail laporan keuangan daerah. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) ini berfungsi sebagai penjelas pada laporan keuangan yang detail dan angka-angkanya tidak bisa diungkapkan dalam sebuah laporan keuangan. Meskipun sifatnya sebagai pelengkap, namun Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) ini sangat penting dalam penyajian laporan keuangan. Bahkan tidak bisa dipisahkan dari laporan keuangan itu sendiri, terutama pada daerah terbuka dimana banyak pihak yang mencari informasi mengenai laporan keuangan perusahaan tersebut.

Tidak semua informasi mengenai keuangan daerah tersedia di laporan keuangan wajib, sehingga Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) ini sangat diperlukan. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) ini menyajikan data yang hanya bisa dinarasikan, tidak bisa dituangkan lewat angka dan nominal seperti laporan keuangan pada umumnya.

5) Masalah pengungkapan.

Yaitu terdiri dari pengungkapan transaksi atau peristiwa khusus, peristiwa selain tanggal neraca.

6) Laporan auditor dan manajemen.

Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Penyusunan laporan audit harus berdasarkan empat standar pelaporan yang ada dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

g. Prinsip Konsistensi

Perangkat indikator prinsip konsistensi pelaporan keuangan yaitu sebagai berikut :

1) Standar Operating Procedure

Standar Operating Procedure dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/ pelaksanaan kebijakan. Pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan, bahwa semua keputusan dan tindakan serta penggunaan fasilitasfasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi berjalan secara efektif, konsisten, standar dan sistematis. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur, penyelenggaraan administrasipemerintahan dapat berjalan dengan pasti. Berbagai bentuk penyimpangan dapatdihindari atau sekalipun terjadi penyimpangan di lingkungan pemerintahan, haltersebut dapat ditemukan penyebabnya dan bisa

diselesaikan dengan cara yang tepat.Apabila semua kegiatan sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam StandarOperasional Prosedur, maka secara bertahap kualitas pelayanan publik akan lebihprofesional, cepat dan mudah.

2) Mekanisme pertanggungjawaban.

Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPAPBD) merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah setelah proses penyusunan Rancangan APBD, persetujuan RAPBD oleh DPRD, pengesahan APBD oleh Pemerintah Pusat, penetapan menjadi APBD, dan pelaksanaan APBD selesai dilakukan. Secara normatif, mekanisme PPAPBD merupakan suatu rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam konteks hukum administrasi negara, mekanisme PPAPBD merupakan bentuk pengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan antara lain Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

3) Laporan Tahunan

Laporan tahunan adalah laporan yang berisi ringkasan keuangan dan aktivitas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam periode satu tahun. Di dalamnya terdapat analisis manajemen mengenai kondisi keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta rencana satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di masa depan. Laporan tahunan biasanya

disiapkan untuk pihak eksternal, regulator, atau pihak-pihak yang berkepentingan.

4) Laporan Pertanggung Jawaban

Laporan pertanggungjawaban (LPJ) merupakan laporan dalam bentuk dokumen tertulis yang disusun untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan dari suatu unit organisasi kepada unit organisasi lainnya yang lebih tinggi atau sederajat. Laporan ini berfungsi sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan. Nantinya, hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan di masa mendatang. Laporan pertanggungjawaban memuat laporan mengenai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana. Laporan pelaksanaan kegiatan adalah laporan yang berisi tujuan, manfaat, fungsi, serta isi kegiatan dari awal hingga akhir secara rinci.

5) Sistem Pemantauan Kinerja

Menurut Suryana (2011), *monitoring* ditujukan untuk memperoleh fakta, data dan informasi tentang pelaksanaan program, apakah proses pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncakan. Selanjutnya temuan-temuan hasil *monitoring* adalah informasi untuk proses evaluasi sehingga hasilnya apakah program yang ditetapkan dan dilaksanakan memperoleh hasil yang berkesesuaian atau tidak.

6) Sistem Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

7) Mekanisme reward and punishment

Reward dan punishment adalah hal yang dipakai oleh atasan dalam menggerakkan pegawainya untuk bekerja bersama di kantor. Reward diberikan kepada pegawai yang menyelesaikan pekerjaanya sesuai target yang diberikan oleh atasan biasanya berupa piagam penghargaan. Biasanya pemberian reward lebih memotivas pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Punishment biasanya memang diberikan kepada pegawai yang malas masuk kantor dan diberikan penurunan pangkat sebagai hukumannya.

h. Fairness Disclosur principle (Prinsip Kewajaran)

Prinsip Kewajaran (Fairness), menurut prinsip ini laporan keuangan pemerintah dikatakan wajar apabila memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan yang wajar berarti bebas dari salah saji material dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Pada tahap proses pelaporan pertanggungjawaban , beberapa indikator untuk menjamin akuntabilitas pelaporan adalah:

1) Pembuatan Pelaporan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap individu yang berkewenangan.
2) Pembuatan pelaporan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di Kabupaten Bulukumba
3) Adanya mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
4) Kewajaran maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tesebut.

Good Governance juga memiliki beberapa prinsip yang dikaitkan dengan laporan keuangan. Dalam Kuntadi (2011), prinsip-prinsip good governance tersebut diuraikan sebagai berikut :

a. Prinsip Akuntabilitas, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dan menjadi alat pengawasan yang efektif.
b. Prinsip Transparansi, pemerintah dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi yang jelas, akurat, tepat waktu, dan dapat dibandingkan. Informasi yang disajikan tersebut menunjukkan kualitas laporan keuangan dan kepercayaan stakeholder tergantung pada kualitas informasi yang disajikan pemerintah.

c. Prinsip Responsibilitas, berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah juga dituntut untuk mematuhi aturan dan hukum yang berlaku.

2.6.2 Karekteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 adalah ukuran – ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (PP RI No 17 Tahun 2010) dijelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Relevan, yaitu informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevalusi peristiwa masa lalu atau masa kinid an memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi merekadi masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut:

   1) Manfaat umpan balik (*Feedback Value*) adalah informasi memungkinkan penggunauntuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi dimasalalu.
   2) Manfaat prediktif (*PredictiveValue*) adalah informasi yang dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yangakan datang berdasarkan hasi llalu dan kejadian masakini.

3) Tepat waktu adalah informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
4) Lengkap adalah informasi yang disajikan mencakup semua informasi akuntansiyang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, sertadapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:
1) Penyajian jujur adalah informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secar awajar dapat diharapkan disajikan.
2) Dapat diverifikasi adalah informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukan simpulan yang tidak jauh beda.
3) Netralitas adalah informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuanganakan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan

laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

d. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Pernyatan Standar AkuntansiPemerintahan (SAP) Nomor 1 paragraf 9 sebagaimana terdapat diPeraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar AkuntansiPemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi- transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Laporan keuangan pemerintah sangat berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, dalam rangka memenuhi seluruh informasi yang diperlukan dalam mewujudkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah yang dikehendaki diperlukannya ukuran normatif. Kualitas pelaporan keuangan dapat diukur dengan beberapa indikator (Darwanis,2016:60) antara lain:

a. Manfaat dari pelaporan keuangan yang dihasilkan, yaitu merupakan salah satu unsur prasyarat normatif pelaporan

keuangan, yaitu relevan. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila memiliki manfaat umpan balik (*feedbackvalue*), yakni informasi dalam laporan keuangan memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau memperbaiki harapan yang telah dibuat sebelumnya dan memiliki manfaat prediktif (*prediktif value*), yakni informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

b. Ketepatan waktu pelaporan keuangan,yaitu penyajian laporan keuangan secara tepat waktu merupakan aspek penting untuk memperoleh keunggulan dalampengambilan keputusan. Laporan keuangan akan bermanfaat jika disampaikan secara tepat waktu kepada pemakainya, informasi yang tepat waktu akan memiliki nilai dan dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan.

c. Kelengkapan informasi yang disajikan,yaitu informasi akuntansi keuangan pemerintah harus disajikan selengkap mungkin,serta mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi utama termuat dengan jelas agar mencegah kekeliruan dalam penggunaan informasi. Informasi yang tidak lengkap bisa menimbulkan kesulitan karena bagian informasi yang tidak dicantumkan bisa saja merupakan unsur penting dalam pengambilan keputusanitu sendiri.

d. Penyajian secara jujur, yaitu informasi akuntasni pemerintah harus disajikan secara jujur, yaitu menggambarkan denganjujur setiap transaksi sertaperistiwa lainnya sehingga menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Semakin jujur dalam penyajian laporan keuangan, maka akan meningkatkan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.

e. Isi laporan keuangan dapat diverifikasi, yaitu informasi yang disajikan laporan keuangan harus dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda hasilnya teta pmenunjukan simpulan yang tidak berbeda jauh. Ada dua cara untuk memverifikasi laporan keuangan,secara langsung dan tidak langsung. Verifikasi langsung terhadap laporan keuangan dilakukan melalui observasi, perhitungan, dan pengukuran, sedangkan verifikasi tidak langsung adalah

f. Isi laporan keuangan dapat dibandingkan, yaitu infromasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukans ecara internal maupun eksternal.

g. Keakuratan dan kejelasan informasi yang disajikan Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus akurat dan jelas, sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh para pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, pengguna harus memiliki pengetahuan

yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasientitas akuntansi dan pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk memperlajari informasi yang dimaksud.

Hal ini sesuai dengan unsur–unsur yang terkandung dalam empat prasyarat normatif kualitatif laporan keuangan, yaitu: relevan,andal,dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (PP 71 Tahun 2010).

Dari uraian pembahasan diatas maka dapat dipahami bahwa pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan daerah bertujuan agar laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi pemerintah daerah dapat memenuhi karakteristik kualitatif sebuah laporan keuangan. Namun hal yang lebih penting dari sebuah pengawasan adalah agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat membantu pemerintah untuk dapat mengambil keputusan yang akan berguna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.7 Pengelolaan Keuangan Derah

2.7.1 Beberapa Hal Penting Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Hal yang penting untuk di ketahui dalam mengelola keuangan daerah pada ketentuan perundang-undangan pada UU Nomor 71 Tahun 2003 tentang keuangan Negara menjelaskan bahwaKeuangan negara dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan tanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Ketentuan perundang-

undangan tersebu tsecara limitatif telah menjelaskan siklus pengelolaan keuangan Negara/daerah yang dimulaid ari: Perencanaan, Pembahasan, Pengesahan, Penatausahan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangnya yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban (Mardiasmo,2012: 9). Dalam suatusi sitem pengelolaan daerah harus selalu bertumpu pada kepentingan publik. Dapat ditinjau dari aspek administrasi atau manajemen yang dimaksud dengan pengelolaan anggaran adalah proses pengurusan,penyelenggaraan,penyediaan,dan penggunaan uangdalam setiap usaha kerja sama sekelompok orang untuk tercapainya suatu tujuan (Mardiasmo, 2012:9).

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,sebagai sebuah implementasi kebijakan dalam praktik, memerlukan kapasitas sumber daya manusiayang memadai dari segi jumlah dan keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasiyang memadai), disamping pengembangan kapasitas organisasi (Insani,2010). Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Dita,2011:35). Sumber daya

merupakan salahsatu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dalam pengelolaan anggaran pemerintah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas,yang juga harus didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi ,pelatihan dibidang akuntansi,dan yang telah memiliki pengalaman dibidang keuangan. Sehingga Sumber Daya Manusia(SDM) tersebut mampu memahami logika akuntansid engan baik. Kegagalan SDM dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang telah diterapkan pemerintah (Warisno,2008).

Pemilikan pengetahuan khusus merupakan penentuan keahlian yang mana pengetahuan tersebut diperoleh melalui pengalaman kerja selama bertahun-tahun. Kemudian dapat dikatakan bahwa dalam rangka pencapaian keahlian, seseorang pengelola keuangan harus mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam bidangnya. Pengetahuan ini bisa didapat dari pendidikan formal yang dikembangkan dengan pelatihan.

Menurut Sartika (2015: 4) seseorang yang melakukan pekerjaan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya akan memberikan

hasilyang lebih baik daripada mereka yang tidak mempunyai pengetahuan cukup atas tugasnya,dengan maksud tersebut laporan keuanganyang disusun dan dikelola oleh pengelola yang berpengetahuan akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Pengetahuan pengelola merupakan kemampuan, kompetensi, ilmu dan pengetahuan yang didapatkan baik secara formal,yaitu pendidikan maupun melalui pelatihan yang pernah diikuti oleh suatu instansi untuk mengelola dan melaksanakan kegiatannya.

Pengetahuan pengelola dibidang akuntansi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam organisasi maupun pemerintah untuk mencapai tujuannya. Pengetahuan pengelola yang cukup memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas atau keandalan laporan keuangan,serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders* (Sartika, 2015:5).

2.7.2 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Anggaran Pemerintahan

Prinsip penganggaran pada umumnya dikenal dengan ekonomis, efesien,dan efektif. Dijelaskan bahwa ekonomis hanya berkaitan dengan input; efektivitas berkaitan dengan output; sedangkan efesiensi adalah kaitan antara output dengan input. Dengan demikian,prinsip penganggaran terlihat sangat terkait dengan prinsip akuntansi sector publik (Bastian, 2010:230)

Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip penganggaran bersifat sangat dinamis. Munculnya konsep '*good governance*' sangat

menekankan pada prinsip transparansi,akuntabilitas, dan partisipasi (Bastian, 2010:231).

Menurut Bastian (2010:231) sejumlah prinsip sistem penganggaran sudah mengacu padaperkembangan terakhir dalam masyarakat, yaitu:

a. Demokratis, yaitu mengandung makna bahwa anggaran, baik yang berkaitan dengan pendapatan maupuny ang berkaitan dengan pengeluaran, harus diterapkan melalui suatu proses yang mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat, selain harus dibahas dan mendapatkan persetujuan darilegislative.
b. Adil, yaitu anggaran Negara harus diarahkan secara optimal bagi kepentingan orang banyak dan secara proporsional dialokasikan ke semua kelompok dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
c. Transparan, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban penganggaran negara harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, tetapi juga masyarakat umum.
d. Bermoral tinggi, yaitu pengelolaan anggaran negara berpegang pada peraturan perundangan yang berlaku, serta senantiasa mengacu pada etika dan moral yang tinggi.
e. Berhati-hati, yaitu pengelolaan anggaran negara juga harus dilakukan secara berhati-hati, karena posisi sumber daya jumlah terbatas dan mahal harganya. Hal ini semakin terasa penting jika dikaitkan dengan unsur hutang organisasi

f. Akuntabel, yaitu pengelolaan keuangan organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan setiap saat secara internal maupun eksternal kepada rakyat.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menyempurnakan pengaturan

Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan identifikasi masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya selama ini. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Perencanaan dan penganggaran.

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah terkelompokkan

dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Peraturan Pemerintah ini menentukan proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

Indikator Kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format RKA, namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini di Pemerintahan Daerah lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan Keluaran (output) dan Hasil

(outcome) yang akan dicapai. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran pendekatan Kinerja lebih fokus pada Keluaran (output) dan Hasil (outcome) dari Kegiatan.

Hal ini terjadi akibat kurangnya informasi tentang Keluaran (output) dan Hasil (outcome) dalam dokumen penganggaran yang ada. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini menyempurnakan pengaturan mengenai dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur Kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis Kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai.

b. Pelaksanaan dan penatausahaan.

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya

dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

Peraturan Pemerintah ini juga mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD.

Peraturan Pemerintah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan juga menjadi fokus Peraturan Pemerintah ini. Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk Pemerintah Daerah sehingga dukungan dan kerja sama

dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntasi akrual.

c. Pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban

yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

Selanjutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

BAB III

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka Konsep Penelitian

Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan dalam lingkup pemerintahan, yaitu Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah, dan satuan organisasi di lingkungan Pemerintahan Pusat/Daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi yang dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini yaituPeraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 lampiran 2, maka ruang lingkup yang mencakup Standar Akuntansi Pemerintah yaitu laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis kas menuju akrual/*cash toward accrual*. Pernyataan Standar ini berlaku untukentitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

Adapun ruang lingkup Standar Akuntansi Pemerintah ini mengacu pada kerangka konseptual yang merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya dapat disebut standar. Kerangka konseptual ini membahas:

a. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintaha (SAP)
b. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
c. Teknologi Informasi

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :

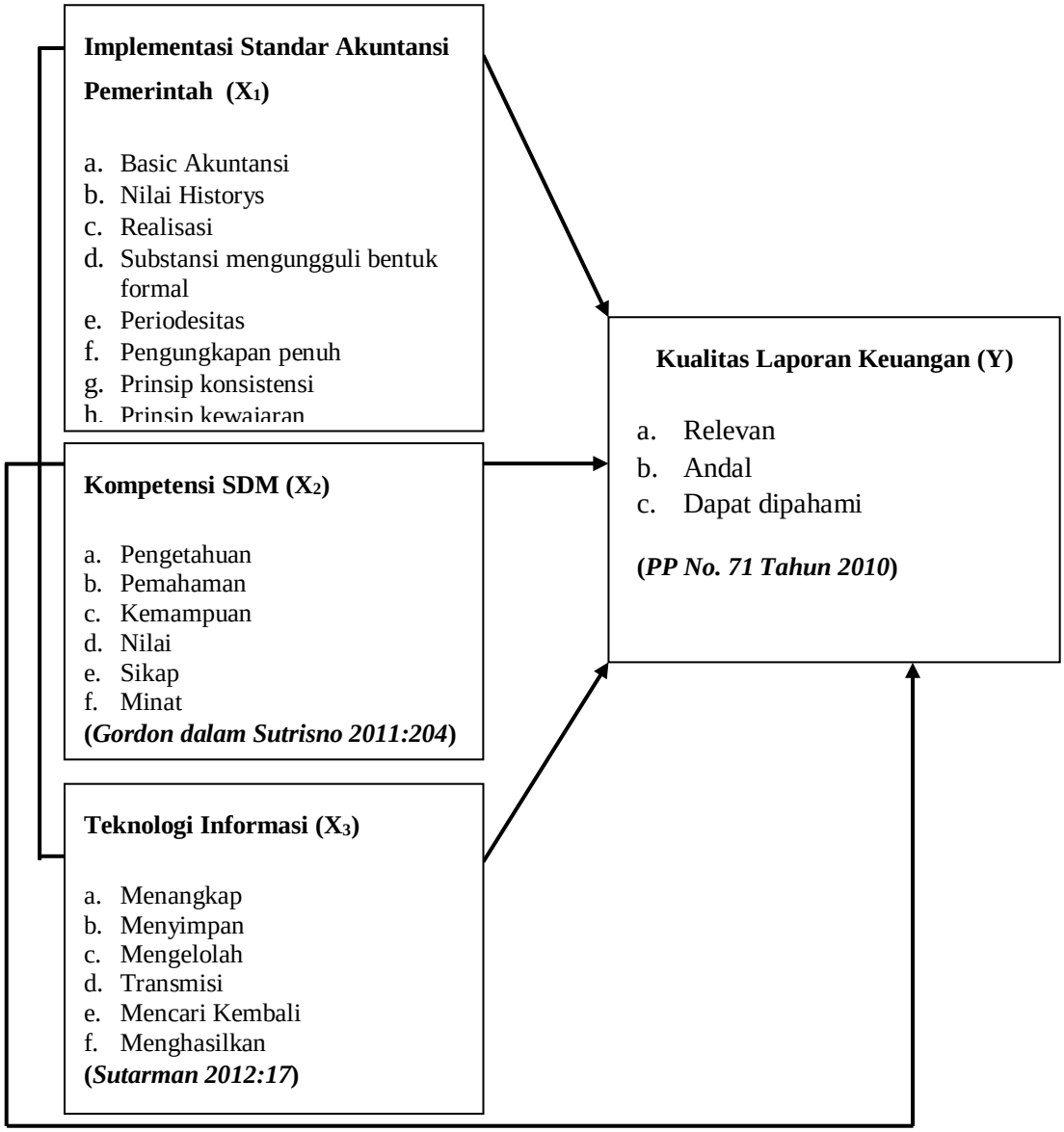

Gambar 3.1
Kerangka Konseptual Penelitian

3.2 Hipotesis

Mengacu pada tinjauan pustaka serta kerangka pikir yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa hipotesis penelitian, yaitu :

a. Diduga implementasi Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP), Kualitas Sumber Daya manusia dan Tekhnologi Informasi berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah di Kabupaten Bulukumba.
b. Diduga implementasi Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP), Kualitas Sumber Daya manusia dan Tekhnologi Informasi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah di Kabupaten Bulukumba.
c. Diduga variabel yang paling berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bulukumba adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 **J**enis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendakatan deskriptif. Penelitian kuantitatif yaitu memperoleh data dari hasil pembagian kuesioner kepada responden yang nantinya akan diolah dengan menggunakan program computer aplikasi SPSS versi 22.

Melalui pendekatan deskriptif ini, peneliti menghimpun data yang berupa dat aprimer dandata sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung atau dihimpun dari responden (informan), yang terdiri dari : dua orang dari tiap SKPD di Kabupaten Bulukumba yang dianggap kompeten dan memiliki informasi yang ingin diketahui atau yang bidang tugasnya berkaitan dengan laporan keuangan SKPD, khususnya kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran, serta pihak tertentu yang dipandang mengetahui permasalahan kegiatan pertanggungjawaban pengeluaran melalui teknik wawancara, baik yang sifatnya terstruktur maupun tidak terstruktur dengan menggunakan jenis pertanyaan terbuka maupun tertutup. Sedangkan data sekunder yang digunakan berasal dari data-data (arsip) atau dokumen-dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran SKPD yang berkaitan dengan proses penatausahaan pengeluaran dan pertanggungjawaban penggunaan dana (pengeluaran) di Kabupaten Bulukumba serta dokumen lainnya yang berasal dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Sub Bidang Akuntansi, Sub

Bidang Verifikasi,Sub Bidang Perbendaharaan, dan Sub Bidang Anggaran), dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bulukumba. Data-data atau dokumen tersebut antara lain berupa : laporan pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran, buku register penerimaan dan pengesahan SPJ, dokumen yang digunakan untuk keperluan proses pengeluaran kas (seperti: SPD, SPP, SPM, dan SP2D), serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah pertanggungjawaban pengeluaran.

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneltian ini akan dilakukan di Kabupaten Bulukumba, dengan waktu penilitan pada bulan Juli 2020

4.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 29 SKPD di Kabupaten Bulukumba. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono,2012). Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh (sensus) yaitu semua populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 58 sampel. teknik sampling menggunakan teknik pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling), yang terdiri dari :

a. Kasubag Anggaran SKPD di Kabupaten Bulukumba
b. BendaharaSKPD di Kabupaten Bulukumba.

Pengambilan sampel dalam hal ini terbatas pada orang tertentu yang dapat memberikan informasi yang diinginkan yang terkait Laporan Keuangan SKPD.

4.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di lakukan dengan beberapa cara :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan upaya dalam mencari data sekunder antara lain melalui berbagai teori-teori, tulisan-tulisan ilimiah dan pendapat-pendapat dari pakar dalam berbagai media tulisan.

b. Kuesioner

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada responden untuk memperoleh data pengaruh implementasi SAP, kompetensi Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi terhadap Kualitas laporan keuangan daerah Kab.Bulukumba.

Dalam kuesioner tersebut item pernyataan akan diukur menggunakan skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi responden terhadap sesuatu, yaitu sangat setuju – sangat tidak setuju, sangat baik – sangat tidak baik, dan biasa – sangat biasa. Jawaban responden dalam penelitian ini diberi skor menurut skala Likert sebagai berikut :

Sangat setuju : 5

Kurang setuju : 3

Tidak setuju : 2

Sangat tidak setuju : 1

c. Wawancara

Dalam penelitian ini juga melakukan wawancara kepada responden sebagai bahan pendukung dalam penelitian tentang pengaruh implementasi SAP, kompetensi SDM, teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan Kab. Bulukumba.

4.5 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan kuesioner yang diedarkan kepada responden.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari SKPD di Kabupaten Bulukumba, jurnal, laporan-laporan, dokumen-dokumen, buku-buku dan literatur-literatur lain yang membahas mengenai materi penelitian dan data pendukung lainnya yang dianggap dapat mendukung penelitian ini.

4.6 Analisis Data

4.6.1 Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur valid tidaknya pernyataan yang terdapat dalam instrumen penelitian. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pernyataan yang terdapat dalam kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011: 52).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau andal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini uji reliabilitas data yaitu dengan menggunakan metode *interna consistency reliability* yang menggunakan uji *cronbach alpha* untuk mengidentifikasi seberapa baik item-item dalam kuesioner berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Suatu konstruk ata variabel dinyatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbachalpha*> 0,70 (Ghozali, 2011: 52).

4.6.2 Analisa Regresi Linier Berganda

Teknik analisis data kuantitatif yang diperoleh dari hasil kuesioner menggunakan Analisis Regresi Linier Berganda (*Multiple Regression Analysis*). Analisisregresi linier berganda

dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas (X) yang ditunjukkan oleh teknologi informasi, kompetensi SDM dan profesional terhadap variabel terikat (Y) yang ditunjukkan oleh kinerja pegawai. Rumus yang digunakan dari Sudjana (2012), adalah :

Y = a + ß1x1 + ß2x2 + ß3x3 + e

Keterangan:

Y : Kualitas Laporan Keuangan

X1 :Implementasi SAP

X2 : Kompetensi SDM

X3 : Teknologi Informasi

ß : Koefisien Regresi

a : Konstanta

e : Error

4.6.3 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crossesction) relatif lebih rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan (Ghozali, 2013).

4.7 Uji Hipotesis

4.7.1 Uji t

Melakukan uji t, di mana tujuannya untuk menguji tingkat keberartian pengaruh variabel bebas secara parsial. Langkah yang ditempuh, yaitu :

a. Menentukan Hipotesis

   H_0 : $b_{1-3} = 0$, di mana artinya tidak ada pengaruh secara parsial dari variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen).

   H_1 : $b_{1-3} \neq 0$, di mana artinya ada pengaruh secara parsial dari variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen).

b. Menentukan *level of significant* (α) sebesar 5% dan menentukan nilai t dengan *degree of freedom* (df) sebesar (n-k-1)

c. Menentukan besarnya nilai t_{hitung} dengan menggunakan rumus :

   $$t_{hitung} = \frac{bk}{sb}$$

   di mana : bk = koefisien regresi variabel b_{1-4}

   sb = standar deviasi dari estimasi b_{1-4}

d. Membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel}

   Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan menerima H_a

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan menolak H_a

4.7.2 Uji F

Melakukan uji F tujuannya untuk menguji tingkat keberartian dari variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Langkah-langkahnya adalah :

a. Menentukan Hipotesis

H_0 : $b_{1-3} = 0$, dimana artinya tidak ada pengaruh secara bersama-sama (simultan) dari variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen).

H_a : $b_{1-3} \neq 0$, dimana artinya ada pengaruh secara bersama-sama (simultan) dari variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen).

b. Menentukan *level of significant* (α) sebesar 5% dan menentukan nilai Ftabel dengan *degree of freedom* (df) sebesar (n-k-1)

c. Menentukan besarnya nilai F_{hitung} dengan menggunakan rumus :

$$F_{hitung} = \frac{MSR}{MSE} = \frac{MSR}{S2}$$

dimana : MSR = Mean Squared Regression

MSE = Mean Squared Residual

d. Membandingkan nilai F_{hitung} dan F_{tabel}

Jika $F_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan menerima H_a

Jika $F_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan menolak H_a

4.7.3 Uji β

Uji beta yaitu untuk menguji variabel-variabel bebas/independen (X) yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap variabel terikat/independen (Y) dengan menunjukkan variabel yang mempunyai koefisien beta standardized tertinggi.

BABV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Umum

5.1.1 Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Bulukumba

Pemerintahan Kabupaten Bulukumba membawahi 10 (sepuluh) kecamatan defenitif dan terbagi kedalam 27 kelurahan dan109 desa. Ke-10 kecamatan tersebut adalah sebagaiberikut:

a. Kecamatan Ujungbulu (Ibu kota Kabupaten)
b. Kecamatan Gantarang
c. Kecamatan Kindang
d. Kecamatan Rilau Ale
e. Kecamatan Bulukumpa
f. Kecamatan ujungloe
g. Kecamatan Bonto Bahari
h. Kecamatan Bonto Tiro
i. Kecamatan Kajang Kecamatan Herlang

Dari 10 kecamatan tersebut,tujuh diantaranya merupakan daerah pesisir sebagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujung bulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bonto Tiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Tiga kecamatan lainnya tergolong sentra pengembangan pertanian dan perkebunan.

Kondisi PNS pemda pada tahun 2018, di Bulukumba terdapat 7.519 PNS. Ditinjau menurut pendidikan, pendidikan PNS lebih baik dibandingkan pendidikan pekerja pada umumnya yaitu mereka yang berpendidikan rendah (SD dan SLTP sederajat) hanya 3,39 persen, sementara yang berpendidikan SMA 20,91 persen dan Diploma/Universitas mencapai 75,70 persen. Dilihat dari kepangkatannya, 38,18 persen PNS golongan 1 hanya sebesar 2 persen.

5.1.2 Visi Misi Kabupaten Bulukumba

a. Visi Kabupaten

Masyarakat Bulukumba yang sejahtera dan terdepan melalui optimalisasi potensi daerah dengan penguatan ekonomi kerakyatan yang dilandasi pada pemerintahan yang demokratis.

b. Misi Kabupaten

1. Mengingkatkan pelayanan hak dasar masyarakat dibidang infrastruktur, kesehatan dan pendidikan yang merata dan berkeadilan;
2. Mengoptimalkan penataan dan pemanfaatan potensi daerah;
3. Mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor dan wilayah;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berjiwa kompetitif;

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean governance) serta penegakan supremasi hukum dan hak azasi manusia;
6. Meningkatkan kerjasama antardaerah untuk menciptakan peluang kesejahteraan masyarakat dan terbangunnya sinergitas antardaerah;
7. Penataan ruang dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan, budaya, dan penanggulangan bencana;
8. Mendorong terciptanya iklim demokrasi yang kondusif, suasana aman, tertib dan religius didalam kehidupan bermasyarakat;

5.1.3 Struktur Organisasi Kabupaten Bulukumba

Struktur organisasi merupakan suatu bagian dan uraian tugas yang menggambarkan hubungan wewenang dan tanggungjawab bagi setiap karyawan yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, maka seluruh kegiatan dapat dilaksakan dengan baik dan mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Bulukumba Dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari :

a. Staf Ahli
b. Dinas Pemerintahan Daerah.
c. Kecamatan dan Kelurahan
d. Sekretariat Daerah

e. DPRD

f. Perusahaan Daerah.

Dari struktur organisasi pemerintahan Kabupaten Bulukumba dapat di uraikan sebagai berikut :

a. Dinas Pendidikan

Dinas pendidikan mempunyai tugas dan tanggungjawab melaksanakan tugas rumah tangga daerah dibidang pendidikan serta melaksanakan tugas pembantu yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang disebutkan diatas, Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba mempunyai fungsi :

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Pembinaan
4. Pengawasan
5. Administrasi
6. Koordinasi

b. Dinas Kesehatan

Dinas kesehatan adalah unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba.

Dinas kesehatan mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang kesehatan.

c. Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan raung. Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum akan senantiasa menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan Kabupaten Bulukumba. Adapun tujuan layanan penyediaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum meliputi :

1. Menyediakan infrastruktur jalan kabupaten yang aman, efisien, nyaman dan terjangkau.
2. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan sumber daya air lainnya.
3. Meningkatkan pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.
4. Meningkatkan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

d. Dinas Perumahan dan Pemukiman

Dinas perumahan dan pemukiman Kabupaten Bulukumba sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Satuan Kerja Perangkat Daerah ini dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab lansung kepada Bupati Kabupaten Bulukumba dengan tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pengendalian, evaluasi, pembinaan den pengawasan di bidang rumah umum, rumah swadaya, perumahan dan kawasan pemukiman, serta penyediaan tanah pada tingkat Kabupaten sesuai perundang-undangan.

e. Kesbangpol

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Kesatuan Bangsa. Politik dan Perlindungan Masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan beberapa tugas sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang ideologi dan kewaspadaan nasional, ketahanan bangsa dan politik dalam negeri.
2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ideologi dan kewaspadaan nasional, ketahanan bangsa dan politik dalam negeri.
4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah dan penghargaan kebangsaan.

f. Dinas Sosial

1. Visi

Untuk menghadapi tantangan, persaingan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang baik serta perubahan kondisi ke depan yang akan dihadapi serta adanya kewenangan daerah Kabupaten Bulukumba yang luas, perlu adanya antisipasi secara dini oleh instansi Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba agar tetap eksis dan unggul, sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat. Untuk itu Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba perlu memiliki Visi. Visi Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba sebagai lembaga pelayanan Publik di Bidang Pembangunan Kesehjateraan Sosial dan adalah : Terwujudnya Keesehjateraan Sosial Masyrakat Bulukumba melalui penanganan dan pelayanan pembangunan Kesehjateraan Sosial dan yang Profesional dan Berkualitas.

2. Misi

Berdasarkan Visi Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba di atas maka Dinas Sosial Kabupaten Bulukumba menjabarkan kedalam point-point berikut :

a. Pemerataan pembangunan kesehjateraan sosial dalam lingkungan kualitas hidup penyandang masalah kesehjateraan sosial.
b. Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup manusia dan mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan sosial.
c. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehjateraan sosial.
d. Mencegah, mengendalikan serta mengatasi permasalahan sosial dan dampak yang ditimbulkan.
e. Pengembangan pelayanan masyarakat yang profesional.

g. Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintaha di Bidang Keuangan yang dipimpin Kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan adanya undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah makan dibentuklah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba atau

dulu dikenal dengan nama Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bulukumba.

h. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas pengelolaan keuangan dan asset daerah Kabupaten Bulukumba secara organisasi berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati Bulukumb yang dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintaha daerah dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah. Dinas pengelolaan keungan dan asset daerah Kabupaten Bulukumba dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No.10 Tahun 2008 tentang organnisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Bulukumba.

i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berfungsi sebagai :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, dan pengawasan ketenagakerjaan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, dan pengawasan ketenagakerjaan;
c. Pembinaan dan fasilitasi bidang tenaga kerja dan transmigrasi lingkup kabupaten/kota;
d. Pelaksanaan tugas di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, pelatihan kerja dan produktivitas, pengawasan ketenagakerjaan, hubungan industrial dan jaminan sosial, serta ketransmigrasian;
e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

j. Dinas Pemberdayaan Perempuan

Dinas Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan. Dinas Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Derah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan dibidang Pengendalian Penduduk yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan.

k. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan ketahanan pangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, peternakan dan perikanan, ketahanan pangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian, peternakan dan perikanan, dan ketahanan pangan;
3. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pertanian, peternakan dan perikanan, dan ketahanan pangan;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian, peternakan dan perikanan, dan ketahanan pangan;
5. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan

6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi,dan pelaporan di bidang pertanian, peternakan dan perikanan, dan ketahanan pangan.

l. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu innstansi yang bertugas membantu dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang berada dibawah kewenangan daerah. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati Bulukumba dalam melaksakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba merukapan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan sebagai penyelenggara administrasi kependudukan, meliputi kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, penyusunan profil kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bulukumba. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan.

o. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Bulukumba mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

p. Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi Informatika mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang komunikasi

informatika.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi Informatika mempunyai fungsi:

1) perumusan kebijakan daerah di bidang komunikasi informatika;
2) pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi informatika;
3) koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang komunikasi informatika;
4) peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang komunikasi informatika;
5) pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang komunikasi informatika; dan
6) pelaksaanaan administrasi Dinas Komunikasi Informatika.

Visi:

Terwujudnya Penyebarluasan Informasi dan Pelayanan Publik kepada masyarakat melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi

Misi :

1. Meningkatkan kapasitas layanan penyebaran informasi, memberdayakan potensi masyarakat serta kerjasama lembaga komunikasi dan informatika.
2. Mengembangkan aplikasi, muatan layanan publik, standarisasi, penyelenggaraan telekomunikasi serta pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan pelayanan publik

q. Dinas Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan salah satu organisasi Pemerintah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Koperasi, usaha kecil dan menengah. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berlokasi di Jl. Bandeng No. 20 Kelurahan Terang-Terang, mempunyai tugas membantu Bupati Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Kepala Daerah.

r. Dinas Pariwisata

Kabupaten Bulukumba merupakan tempat yang penuh dengan berbagai objek wisata. Oleh karena itu pembangunan pariwisata di Kabupaten Bulukumba sebagai bagian integral dari pembangunan untuk memacu pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. Mengingat potensi pariwisata di Kabupaten Bulukumba sangat besar, pembangunan pariwisata dapat dikembangkan melalui jasa wisata yang memberikan jaminan tercipatanya kesejahteraan masyarakat bidang usaha pariwisata. Dinas pariwisata mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang

pariwisata. Selain itu untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

1) Perumusan kebijakan daerah dibidang pariwisata;
2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pariwisata;
3) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pariwisata;
4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia di vidang pariwisata.
5) Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaran di bidang pariwisata;
6) Pelakasanaan administrasi Dinas Pariwisata, dan
7) Pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

s. Sekretariat DPRD

Kedudukan Sekretariat DPRD menurut Peraturan Bupati nomor 73 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Sekretariat DPRD Kab. Bulukumba. Jumlah Pejabat Struktural dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba sebanyak 13 pejabat yang terdiri dari 1 orang Sekretaris, 3 Kepala Bagian dan 9 Kepala Sub Bagian. Sekwan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekwan dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekwan mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka menyelenggarakan administrasi kesekretariatan,

administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

5.2 Hasil Penelitian

5.2.1 Identitas Respoden

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 58 orang responden pada 29 SKPD di Kabupaten Bulukumba sebagaimana dimaksud dalam metode penelitian, maka diperoleh beberapa karakteristik-karakteristik secara umum yaitu bahwa dari 58 orang responden tersebut sebagian besar adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 30 orang atau 51,7 persen dan sisanya sebanyak 28 orang atau sekitar 48,3 persen yang berjenis kelamin perempuan. Untuk lebih jelasnya perbedaan jumlah responden berdasarkan jenis kelamin tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1
Sebaran Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	30	51,7
2.	Perempuan	28	48,3
	Total	58	100,00

Sumber : Data Primer diolah pada SPSS 22, 2020

Pada tabel 5.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah laki-laki yaitu 30 orang atau 51,7%, sedangkan jumlah perempuan yaitu sebanyak 28 orang atau 58,3% .Sesuai dengan tabel di atas dapat dilihat bahwa kesempatan untuk menduduki posisi bendahara dan kasubag anggaran pada SKPD di Kabupaten Bulukumba memiliki kesempatan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa idealisme perimbangan penggunaan pegawai wanita dan pria telah memenuhi kaidah yang ideal.

Tabel berikut ini akan memperlihatkan sebaran responden menurut kelompok umur yang ada pada SKPD di Kabupaten Bulukumba.

Tabel 5.2
Sebaran Responden Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase (%)
1.	< 35	2	3,45
2.	35 – 40	22	37,93
3.	41 – 45	7	12,07
4.	46 – 50	14	24,14
5.	> 50	13	22,41
	Total	58	100,00

Sumber : Data Primer diolah pada SPSS 22, 2020

Dari tabel terebut di atas terlihat bahwa kelompok umur yang terbanyak adalah umur antara 35 – 40 tahun dengan jumlah 22 orang responden atau sekitar 37,93 persen, sedangkan kelompok umur yang paling sedikit jumlahnya yaitu antara umur kurang dari 35 tahun yang hanya berjumlah 2 orang atau 3,25 persen saja. Adapun dari

pengelempokan umur respoden menurut umur maka termuda adalah umur 34 tahun dan umur tertua adalah 58 tahun.

Maka dapat disimpulkan bahwa bendahara dan kasubag anggaran pada SKPD di Kab Bulukumba didominasi oleh pegawai yang berusia 35 – 40 tahun, hal ini menunjukakan bahwa pegawai pada bidang yg mengurusi keuangan didominasi oleh pegawai yang berada pada usia yang poduktif, ini sesaui dengan tuntuntan atas kinerja professional yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba,seperti yang kita ketahui usia 35 sd 40 tahun adalah usia yang sangat produktif dan tentunya hal ini merupakan suatu komposisi yang ideal.

Sebaran responden menurut tingkat pendidikan dapat dilihat sebagaimana tebel berikut :

Tabel 5.3
Sebaran Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	SARJANA	40	69
2.	MAGISTER	18	31
	Total	58	100,00

Sumber : Data Primer diolah pada SPSS 22, 2020

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai yang menjadi responden pada SKPD di Kabupaten Bulukumba maka tingkat pendidikan pegawai paling tinggi adalah Magister, sedangkan tingkat

pendidikan paling rendah yang menjadi responden adalah Sarjana. Dilihat dari distribusi responden menurut tingkat pendidikannya maka yang paling banyak jumlahnya yaitu 40 orang responden atau 69 % tingkat Sarjana. Adapun paling sedikir jumlanya yaitu Magister sejumlah 18 orang responden atau sekitar 31 %.

Dari table tersebut di atas terrnyata dari 58 orang pegawai didominasi oleh pegawai yang berpendidikan sarjana dan 18 pegawai yang berpendidikan magister, tentu hal ini akan menjadi informasi yang penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawainya menjadi lebih baik dengan melalui study lanjut

Berdasarkan uraian dan tabel distribusi frekuensi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dapat diperoleh gambaran tentang profil dari responden yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini.

5.2.2 Analisis Persepsi Responden Terhadap Variabel Penelitian

1. Variabel Implementasi SAP (X1)

Tabel 5.4
Hasil Analisis Deskriptif Variabel X1

	N	Minimum	Maximum	Mean
X1.1	58	1.00	5.00	3.534
X1.2	58	2.00	5.00	3.845
X1.3	58	2.00	5.00	3.672
X1.4	58	2.00	5.00	3.793
X1.5	58	2.00	5.00	3.845
X1.6	58	2.00	5.00	3.672
X1.7	58	2.00	5.00	3.638
X1.8	58	2.00	5.00	3.552
Valid N (listwise)	58			

Ket :Klasifikasi Mean 1.00 – 2.32 rendah

Klasifikasi Mean 2.33 – 3.65 sedang

Klasifikasi Mean 3.66 – 5.00 tinggi

Berdasarkan tabel 5.4 di atas dilihat bahwa rata-rata nilai tertinggi atau mean dari 8 pernyataan dapat dilihat pernyataan yang memiliki rata-rata atau mean tinggi yaitu :

a. pernyataan ke 2 (Laporan keuangan yang saya susun selesai secara tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan saat ini dan pengoreksi keputusan masa lalu (*feedback value*) dengan skor atau nilai maksimum 5 dan minimum 2.

b. Pernyataan 3 (Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan telah benar dan memenuhi kebutuhan para pengguna dan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu sehingga teruji kebenarannya) dengan mean 3,672 , nilai max 5 dan min yaitu 2
c. Pernyataan 4 (Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya sehingga bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material) dengan mean 3,793 , nilai max 5 dan min yaitu 2
d. Pernyataan 5 (Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang saya susun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya) dengan mean 3,845 , nilai max 5 dan min yaitu 2
e. Pernyataan 6 (Dalam penyusunan laporan keuangan, saya telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada SAPdari tahun ke tahun) dengan mean 3,672 , nilai max 5 dan min yaitu 2

Sedangkan nilai mean sedang yaitu terdapat pada :

a. pernyataan 1 (Laporan keuangan yang saya susun sesuai denga SAP, dengan informasi yang lengkap mencakup semuainformasi akuntansi yang dapat digunakan

dalampengambilan keputusan.) dengan mean 3,534 nilai max 5 dan min yaitu 1

b. pernyataan 7 (Laporan yang saya buat disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti dan dipahami) dengan mean 3,638 nilai max 5 dan min yaitu 2

c. pernyatan 8 (Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangantelah jelas dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuikan dengan batas pemahaman para pengguna) dengan mean 3,552. dengan max 5 dan min yaitu 2.

2. Variabel Kompetensi SDM (X2)

Tabel 5.5
Hasil Analisis Deskriptif Variabel X2

	N	Minimum	Maximum	Mean
X2.1	58	1.00	5.00	3.362
X2.2	58	2.00	5.00	3.603
X2.3	58	2.00	5.00	3.793
X2.4	58	2.00	5.00	3.448
X2.5	58	1.00	5.00	3.362
Valid N (listwise)	58			

Ket :Klasifikasi Mean 1.00 – 2.32 rendah

Klasifikasi Mean 2.33 – 3.65 sedang

Klasifikasi Mean 3.66 – 5.00 tinggi

Berdasarkan tabel 5.5 di atas dapat dijelaskan bahwa variabel Kompetensi SDM terdapat 5 pernyatan, ada 2 pernyataan dengan mean tinggi yaitu :

a. Pernyataan 2 (Saya memiliki pemahaman akuntansi yang sangat baik) dengan mean 3.603, skor atau nilai max yaitu 5 dan minimal 2.
b. Pernyatan 3 (Saya sangat berpengalaman dalam melaksanakan tugas pengimplementasian SAP berbasis akrual pada laporan keuangan) dengan mean 3.793, skor atau nilai max yaitu 5 dan minimal 2.

Sedangkan untuk pernyataan yang memiliki nilai mean sedang yaitu :

a. Pernyatan 1 (Saya memiliki tingkat pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan saya dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual pada laporan keuangan.) dengan mean 3.362 dengan nilai max yaitu 5,minimal yaitu 1.
b. Pernyatan 4 (Saya memiliki profesionalisme yang tinggi ketika melaksanakan pekerjaan dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual pada laporan keuangan) dengan nilai mean 3.448. nilai max yaitu 5 dan min 2.
c. Pernyatan 5 (Saya selalu aktif dalam mengikuti pelatihan-pelatihan pengimplementasian SAP berbasis akrual) dengan mean 3.362, nilai max yaitu 5 dan min. yaitu 1

3. Variebel Teknologi Informasi (X3)

Tabel 5.6
Hasil Analisis Deskriptif Variabel X3

	N	Minimum	Maximum	Mean
X3.1	58	2.00	5.00	3.828
X3.2	58	2.00	5.00	3.793
X3.3	58	2.00	5.00	3.741
X3.4	58	1.00	5.00	3.810
X3.5	58	2.00	5.00	3.621
X3.6	58	2.00	5.00	3.759
Valid N (listwise)	58			

Ket : Klasifikasi Mean 1.00 – 2.32 rendah

Klasifikasi Mean 2.33 – 3.65 sedang

Klasifikasi Mean 3.66 – 5.00 tinggi

Berdasarkan tabel 5.6 di atas dapat dilihat bahwa dari 6 pernyatan ada 5 pernyataan yang memiliki mean tinggi yaitu :

a. Pernyataan 1 (Proses penyusunan Laporan Keuangan di tempat saya bekerja telah tercatat dan terperinci dengan baik) dengan mean 3.828, nilai max yaitu 5 dan min yaitu 2.
b. Pernyataan 2 (Laporan Keuangan di SKPD saya telah disimpan dalam satu storage khusus Laporan Keuangan) dengan nilai mean 3,793 nilai max yaitu 5 dan min yaitu 2.

c. Pernyataan 3 (Kami dapat mengolah atau memproses Data Laporan keuangan menjadi sebuah informasi keuangan) dengan nilai mean 3,741 nilai max yaitu 5 dan min yaitu 2.

d. Pernyataan 4 (Proses pendistribusian Laporan Keuangan tiap bidang telah menggunakan jaringan) dengan nilai mean 3,810 nilai max yaitu 5 dan min yaitu 1.

e. Pernyataan 6 (Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi) dengan nilai mean 3,759 nilai max yaitu 5 dan min yaitu 2.

Sedangkan untuk pernyataan yang memiliki mean sedang yaitu pernyataan 5 (Laporan Keuangan yang telah dibuat disimpan dengan baik sehingga dapat dicari saat dibutuhkan) dengan mean 3,621 dengan nilai max yaitu 5 dan min yaitu 2.

4. Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Tabel 5.7
Hasil Analisis Deskriptif Variabel Y

	N	Minimum	Maximum	Mean
Y1.1	58	1.00	5.00	3.966
Y1.2	58	2.00	5.00	4.034
Y1.3	58	2.00	5.00	3.931
Y1.4	58	2.00	5.00	3.672
Y1.5	58	2.00	5.00	3.914
Y1.6	58	2.00	5.00	3.759
Valid N (listwise)	58			

Ket :Klasifikasi Mean 1.00 – 2.32 rendah

Klasifikasi Mean 2.33 – 3.65 sedang

Klasifikasi Mean 3.66 – 5.00 tinggi

Berdasarkan tabel 5.7 di atas dapat dilihat bahwa dari 6 pernyatan untuk variabel kualitas laporan semuanya memiliki mean dengan kualifikasi tinggi :

a. Pernyataan 1 (Laporan keuangan pada instansi tempat Saya bekerja, telah menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktivitas keuangan di masa lalu.**)** dengan mean 3.966, nilai max yaitu 5 dan min yaitu 1
b. Pernyataan 2 (Pada instansi tempat Saya bekerja, laporan keuangan disajikan dan diterbitkan tepat waktu sesuai periode akuntansi) dengan mean 4,034 nilai max yaitu 5 dan min yaitu 2
c. Pernyataan 3 (Laporan keuangan pada instansi tempat Saya bekerja, telah menghasilkan informasi yang jujur sesuai transaksi yang terjadi dan peristiwa keuangan lainnya yang seharusnya disajikan) dengan mean 3,931 nilai max yaitu 5 dan min yaitu 2
d. Pernyataan 4 (Informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan pada instansi tempat Saya bekerja dapat memenuhi kebutuhan pengguna) dengan mean 3,672 nilai max yaitu 5 dan min yaitu 2.

e. Pernyataan 5 (Pada instansi tempat Saya bekerja, informasi laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipahami dengan jelas) dengan mean 3,914 nilai max yaitu 5 dan min yaitu 2.

f. Pernyataan 6 (Laporan keuangan pada instansi tempat Saya bekerja telah disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti) dengan mean 3,759 nilai max yaitu 5 dan min yaitu 2.

5.2.3 Uji Validitas dan Realibitas

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan skor setiap item dengan skor total dari masing-masing atribut, formulasi koefisien yang digunakan adalah *Pearson Product Moment Test* dengan program SPSS ver. 22 .0. seperti yang tampak pada Tabel 5.9. Menurut Sugiyono (2001), korelasi antara skor total item adalah merupakan interpretasi dengan mengkonsultasikan nilai r_{tabel}. Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel}, maka instrumen dinyatakan valid. Untuk mendapatkan r_{tabel} dilakukan dengan tabel r product moment, yaitu menentukan alpha (α) = 0,05 kemudian df=n(sampel)-2 = 58 orang - 2 = 56, sehingga didapat nilai r_{tabel} sebesar 0,258. Dari uji validitas yang dilakukan terhadap skor setiap item dengan skor total dari masing-masing atribut dalam penelitian ini, maka didapatkan hasil seluruh item variabel bebas dan variabel terikat menunjukkan r_{hitung} lebih besar daripada 0,

Tabel 5.8
Hasil Uji Item Variabel

Variabel	Item	r_{hitung}	r_{tabel} (Sig.5%)	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	1	0,837		Valid
	2	0,871		Valid
	3	0,812	0,258	Valid
	4	0,761		Valid
	5	0,774		Valid
	6	0,776		
Implementasi SAP (X_1)	1	0,689		Valid
	2	0,747		Valid
	3	0,776	0,258	Valid
	4	0,778		Valid
	5	0,812		Valid
	6	0,781		
	7	0,768		
	8	0,742		
Kompetensi SDM (X_2)	1	0,841		Valid
	2	0,874		Valid
	3	0,78	0,258	Valid
	4	0,78		Valid
	5	0,8		Valid
Teknologi Informasi (X_3)	1	0,745		Valid
	2	0,839		Valid
	3	0,819	0,258	Valid
	4	0,644		Valid
	5	0,74		Valid
	6	0,657		

Sumber : Data Primer diolah pada SPSS 22, 2020

2. Uj Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dengan *internal concistency* dilakukan dengan cara menguji instrumen hanya sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Cronbach's Alpha. Konsep reliabilitas menurut pendekatan ini adalah konsistensi antara item-item dalam suatu instrumen. Tingkat keterkaitan antar item pertanyaan dalam suatu instrumen untuk mengukur variabel tertentu menunjukkan tingkat reliabilitas konsistensi internal instrumen yang bersangkutan. Dari hasil pengolahan data, nilai alpha masing-masing variabel dapat dilihat pada Tabel 5.11 sebagai berikut :

Tabel 5.9
Uji reliabilitas masing-masing variabel

Nama Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,891	Reliabel
Implementasi SAP (X_1)	0,896	Reliabel
Kompetensi SDM (X_2)	0,871	Reliabel
Teknologi Informasi (X_3)	0,832	Reliabel

Sumber : Data Primer diolah pada SPSS 22, 2020

Hasil pengolahan data melalui program analisa data SPSS ver. 22 maka dapat dilihat nilai *Alpha Cronbach* masing-masing variabel yang meliputi Implementasi SAP, Kompetensi SDM dan Teknologi Informasi mempunyai nilai masing-masing variabel lebih besar dari 0,60 yang dapat diartikan masing-masing variabel

yang ada dapat dikatakan memenuhi persyaratan atau variabel tersebut bisa dikatakan reliabel.

5.2.4 Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan taknik analisis regresi linear berganda dengan asumsi persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + ß1x1 + ß2x2 + ß3x3 + e$$

Dimana :

Y : Kualitas Laporan Keuangan

X1 :Implementasi SAP

X2 : Kompetensi SDM

X3 : Teknologi Informasi

ß : Koefisien Regresi

a : Konstanta

e : Error

Dengan menggunakan alat bantu program analisa data SPSS Ver. 22 maka nilai koefisien regresi masing-masing veriabel meliputi implementasi SAP, kompetensi SDM dan teknologi informasi, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.10
Hasil Perhitungan Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,776	1,984		1,903	,062
	Implementasi SAP (X1)	,194	,086	,255	2,246	,029
	Kompetensi SDM (X2)	,422	,141	,424	2,990	,004
	Teknologi Informasi (X3)	,281	,132	,253	2,129	,038

Sumber : Data Primer diolah pada SPSS 22, 2020

Berdasarkan hasil analisa data menggunakan SPSS Ver. 22 diperoleh dalam perhitungan regresi diatas, maka persamaan regresinya menjadi :

$Y = 3,776 + 0,194\ X_1 + 0,422\ X_2 + 0,712\ X_3$

Persamaan linear berganda di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai koefisien regresi Implementasi SAP (X_1) sebesar 0,194 berarti ada pengaruh positif Implementasi SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Bulukumba sebesar 0,194 sehingga skor Implementasi SAP naik 1 poin maka akan diikuti dengan kenaikan skor Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Bulukumba sebesar 0,194.
2. Nilai koefisien regresi Kompetensi SDM (X_2) sebesar 0,422 berarti ada pengaruh positif Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Bulukumba sebesar 0,422 sehingga skor Kompetensi SDM naik 1 poin maka akan diikuti dengan kenaikan

skor Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Bulukumba sebesar 0,422.

3. Nilai koefisien regresi Teknologi Informasi (X_3) sebesar 0,712 berarti ada pengaruh positif Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Bulukumba sebesar 0,712 sehingga skor Teknologi Informasi naik 1 poin maka akan diikuti dengan kenaikan skor Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Bulukumba sebesar 0,712.

5.2.5 Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis yang berkembang saat ini maka dalam penelitian ini penilis menggunakan beberapa pengujian, yaitu :

a. Uji t (Pengujian secara parsial)
b. Uji F (Pengujian secara simultan)
c. Uji Beta (Pengujian secara dominan)

Dengan dibantu menggunakan program analisa pengolahan data SPSS Ver. 22 yang dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengujian Secara Parsial (Uji-t)

Untuk menguji variabel secara parsial atau sendiri-sendiri variabel independen (X) tehadap variabel dependen (Y) dapat digunakan uji t. Ini dapat dilihat dalam hasil analisa pengolahan data SPSS Ver. 22 yang tertuang dalam tabel 5.11 Berikut :

Tabel 5.11
Hasil Uji t

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3,776	1,984		1,903	,062
	Implementasi SAP (X1)	,194	,086	,255	2,246	,029
	Kompetensi SDM (X2)	,422	,141	,424	2,990	,004
	Teknologi Infotmasi (X3)	,281	,132	,253	2,129	,038

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Sumber : Data Primer diolah pada SPSS 22, 2020

Apabila nilai prob. t hitung (ouput SPSS ditunjukkan pada kolom sig.) lebih kecil dari tingkat kesalahan (alpha) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas (dari t hitung tersebut) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya, sedangkan apabila nilai prob. t hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya.

Adapun hasil uji t masing-masing variabel dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pengaruh Implementasi SAP (X_1) terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Bulukumba (Y)

1) Merumuskan hipotesis

a) $H_0 : b_1 = 0$, artinya X_1 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Y atau tidak ada pengaruh variabel

Implementasi SAP (X_1) terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Bulukumba.

b) H_a : $b_1 \neq 0$, artinya X_1 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Y atau ada pengaruh variabel Implementasi SAP (X_1) terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Bulukumba.

2) Kriteria diterimanya hipotesis :

a) Jika t-hitung > t-tabel dan sig < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima.

b) Jika t-hitung < t-tabel, dan sig > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak.

c) Taraf nyata = 5%, derajat kebebasan (df) = n-2 = 58-2 = 56

3) Menghitung nilai t test

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan alat uji SPSS ver. 22 Diketahui bahwa t_{hitung} variabel implementasi SAP sebesar 2.246 dengan tingkat signifikan sebesar 0,029.

4) Kriteria penerimaan

Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ dengan derajat bebas df = n-2 = 58-2 =56, yang ditentukan t_{tabel} sebesar 2.004.

5) Membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel}

Oleh karena t_{hitung} sebesar 2.246 lebih besar dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 2.004 dan nilai sig 0,029 lebih kecil dari 0,05 hal ini berarti H0 ditolak dan Ha diterima dengan implikasi variable implementasi SAP signifikan mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Bulukumba.

b. Pengaruh Kompetensi SDM (X_2) terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Bulukumba (Y).

1) Merumuskan hipotesis

a) $H_0 : b_2 = 0$, artinya X_2 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Y atau tidak ada pengaruh variabel kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Bulukumba.

b) $H_a : b_2 \neq 0$, artinya X_2 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Y atau ada pengaruh variabel kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Bulukumba.

2) Kriteria diterimanya hipotesis

a) Jika t-hitung > t-tabel dan sig < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima

b) Jika t-hitung < t-tabel, dan sig > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak.

c) Taraf nyata = 5%, derajat kebebasan (df) = n-2 = 58-2 = 56

3) Menghitung nilai t test

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan alat uji SPSS ver. 22 diketahui bahwa nilai t_{hitung} variabel kompetensi sebesar 2.990 dengan tingkat signifikan sebesar 0,004

4) Kriteria penerimaan

Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ dengan derajat bebas df = n-2 = 58-2 =56, yang ditentukan t_{tabel} sebesar 2.004.

5) Membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel}

Oleh karena t_{hitung} sebesar 2.990 lebih besar dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 2.004 dan nilai sig 0,004 lebih kecil dari 0,05 hal ini berarti H0 ditolak dan Ha diterima dengan implikasi variable kompetensi SDM signifikan mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Bulukumba.

c. Pengaruh Teknologi Informasi (X_3) terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Bulukumba (Y)

1) Merumuskan hipotesis

   a) $H_0 : b_3 = 0$, artinya X_3 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Y atau tidak ada pengaruh variabel Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Bulukumba.

   b) $H_a : b_3 \neq 0$, artinya X_3 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Y atau ada pengaruh variabel Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Bulukumba.

2) Kriteria diterimanya hipotesis

   a) Jika t-hitung > t-tabel dan sig < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima.

   b) Jika t-hitung < t-tabel, dan sig > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak.

   c) Taraf nyata = 5%, derajat kebebasan (df) = n-2 = 58-2 = 56

3) Menghitung nilai t test

   Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan alat uji SPSS ver. 22 diketahui bahwa nilai t_{hitung} variabel teknologi informasi sebesar 2.129 dengan tingkat signifikan sebesar 0,038.

4) Kriteria penerimaan

Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ dengan derajat bebas df = n-2 = 58-2 =56, yang ditentukan t_{tabel} sebesar 2.004.

5) Membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel}

Oleh karena t_{hitung} sebesar 2.129 lebih besar dibandingkan dengan t_{tabel} sebesar 2.004 dan nilai sig 0,038 lebih kecil dari 0,05 hal ini berarti H0 ditolak dan Ha diterima dengan implikasi variable Teknologi Informasi signifikan mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Bulukumba

Dari uraian uji t dengan menggunakan program analisa data SPDD ver. Maka diketahui bahwa keiga variabel bebas/independen (X) signifikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Bulukumba dengan ringkasan sebagai berikut :

a. Variabel implementasi SAP (X_1) dengan nilai t_{hitung}2.246> t_{tabel} 2.004
b. Variabel kompetensi SDM (X_2) dengan nilai t_{hitung} 2.990 > t_{tabel} 2.004
c. Variabel teknologi informasi (X_3) dengan nilai t_{hitung} 2.129 > t_{tabel} 2.004

2. Pengujian Secara Simultan (Uji-f)

Uji F berfungsi untuk menguji variabel Implementasi SAP, Kompetensi SDM dan Teknologi Informasi, apakah dari tiga variabel yang diteliti mempengaruhi secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Bulukumba. Analisa dilakukan dengan menggunakan alat bantu program pengolahan sata SPSS Ver. 22 yang dapat dijelaskan dalam tabel 5. 12.

Tabel 5.12
Hasil Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	722,485	3	240,828	50,979	.000[b]
	Residual	255,101	54	4,724		
	Total	977,586	57			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

b. Predictors: (Constant), Teknologi Infotmasi (X3), Implementasi SAP (X1), Kompetensi SDM (X2)

Sumber : Data Primer diolah pada SPSS 22, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS Ver. 22 yang dituangkan dalam tabel di atas, maka dapat dilakukan pengujian hipotesisi sebagai berikut :

a. Merumuskan Hipotesis

1) $H_0 : b_i = 0$, artinya variabel independen (X) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

2) $H_a : b_i \neq 0$, variabel independen (X) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

b. Kriteria diterimanya hipotesis :

1) Jika t-hitung > t-tabel dan sig < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima.

2) Jika t-hitung < t-tabel, dan sig > 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak.

c. Menghitung nilai F_{hitung}

Berdasarkan hasil analisa data SPSS diketahui F_{hitung} sebesar 50.979 dengan signifikan 0,000.

d. Menentukan kriteria penerimaan

Tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah = 0,05 atau dengan interval keyakinan sebesar 95% dengan df (n-k-1) = 58-3-1 = 54 dan ditentukan nilai F_{tabel} = 2,78.

e. Membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel}

Oleh karena nilai F_{hitung} sebesar 50.979, berarti variabel bebas/independen (X) yang meliputi Implementasi SAP, Kompetensi SDM dan Tenologi Informasi secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Bulukumba bisa dikatakan signifikan karena dari pengujian menunjukkan bahwa hasil F_{hitung} = 50.979lebih besar dari F_{tabel}= 2,78 dengan nilai sig 0,00 lebih kecil dari 0,05 atau bisa dikatakan H_o ditolak dan H_a diterima.

3. Pengujian Secara Dominan (Uji Beta)

Uji beta yaitu untuk menguji variabel-variabel bebas/independen (X) yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap variabel terikat/independen (Y) dengan menunjukkan variabel yang mempunyai koefisien beta standardized tertinggi. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS maka dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.13
Hasil Uji Beta

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,776	1,984		1,903	,062
	Implementasi SAP (X1)	,194	,086	,255	2,246	,029
	Kompetensi SDM (X2)	,422	,141	,424	2,990	,004
	Teknologi Infotmasi (X3)	,281	,132	,253	2,129	,038

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Sumber : Data Primer diolah pada SPSS 22, 2020

Berdasarkan hasil nilai beta standardized diketahui bahwa variabel-variabel yang meliputi Implementasi SAP, Kompetensi SDM dan Teknologi Informasi. Dari data diatas dapat di lihat bahwa Implementasi SDM dan Teknologi Informasi hampir merata pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Bulukumba, namun yang paling dominan pengaruhnya adalah Kompetensi SDM.

Penelitian ini juga menemukan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R square) dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.14
Hasil Uji Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.860[a]	,739	,725	2,17350

a. Predictors: (Constant), Teknologi Infotmasi (X3), Implementasi SAP (X1), Kompetensi SDM (X2)

Sumber : Data Primer diolah pada SPSS 22, 2020

Nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 0,739 yang dapat diartikan bahwa variabel bebas/independen (X) yang meliputi implementasi SAP, kompetensi SDM dan teknologi informasi mempunyai kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Bulukumba sebesar 73.9%, sedangkan sisanya sebesar 26.1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

5.3 Pembahasan Hasil Penelitian

5.3.1 Pengaruh Implementasi SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari uraian uji t dengan menggunakan program analisa dara SPSS Ver. 22 maka diketahui bahwa ketiga veriabel bebas/independe

(X) signifikan berpengaruh secara parsial terhadap kulitas laporan keuangan di kabupaten bulukumba dengan variabel implementasi SAP (X_1) dengan nilai t_{hitung}2.246> t_{tabel} 2.004

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2013), dengan judul "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah". Dimana hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa dengan penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) maka laporan keuangan akan lebih berkualitas dalam rangka untuk membentuk suatu pemerintahan yang baik.

Di samping itu penelitian yang dilakukan oleh Permana (2011), Kusumah (2012), Juwita (2013), dan Rahayu,dkk (2014) juga memperoleh hasil bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan sudah diterapkan dengan baik oleh dinas-dinas pada pemerintah daerah sehingga kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah semakin baik karena pada dasarnya kualitas laporan keuangan yang baik adalah sesuai dengan SAP yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan.

5.3.2 Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari uraian uji t dengan menggunakan program analisa data SPSS ver. 22 maka diketahui bahwa ketiga variabel bebas/independen

(X) *signifikan berpengaruh* secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Bulukumba dengan Variabel kompetensi (X_2) dengan nilai t_{hitung} 2.990 > t_{tabel} 2.004.

Hasil ini menunjukkan bahwa kompetensi merupakan salah satu faktor yang signifikan mempengaruhi kinerja pegawai. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, setiap pekerjaan memiliki persyaratan dan serangkaian kompetensi khusus untuk melaksanakannya secara efisien. Dalam instansi pemerintah hal tersebut diistilahkan dengan kompetensi jabatan. Oleh sebab itu, orang-orang yang akan melakukan ditugaskan pada suatu pekerjaan perlu disesuaikan dengan kompetensi yang berkaitan dengan pekerjaannya. Dapat dikatakan bahwa karyawan yang berkompeten adalah sumber daya utama di setiap organisasi agar dapat memperoleh keunggulan dalam persaingan bisnis.

Jika dilihat dari maknanya, kompetensi adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *Competence* yang jika diartikan langsung ke bahasa Indonesia adalah kecakapan, kemampuan dan kewenangan. Apabila diaplikasikan ke Manajemen khususnya Manajemen SDM, Kompetensi dapat diartikan sebagai kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang dapat meningkatkan kinerja karyawan sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap kesuksesan organisasinya. Menurut Mc.Lelland dalam Moeheriono (2012) kompetensi merupakan karakteristik dasar

individu yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau pada situasi tertentu.

Peningkatan kompetensi akan meningkatkan kinerja bawahan dan berdampak pada meningkatnya kontribusi terhadap organisasi atau perusahaan. Dengan demikian jika pegawai memiliki kompetensi maka akan menghasilkan kinerja pegawai yang baik. Kompetensi yang baik dari pegawai dapat terlihat melalui cara berpikir yang kreatif dalam bekerja, mematuhi aturan –aturan pekerjaan dan mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam pekerjaan yang tepat. Hal ini dapat dilakukan pegawai dengan cara mempelajari masalah , mengidentifikasikan kesulitan-kesulitannya, merumuskan masalah dengan baik, mencari cara pemecahannya, mendiskusikan masalah itu dengan orang lain misalnya rekan kerja atau kepada atasan, dan lain sebagainya.

Alfrianto, dkk (2018) melakukan penelitian mengenai kompetensi SDM dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan hasil menunjukkan bahwa hipotesis yang dikemukakan dapat diterima yaitu kompetensi berpengaruh terhadap kinerja aparatur sipil negara di Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian berdasarkan hasil uji asumsi klasik dengan uji normalitas diketahui nilai signifikan untuk kompetensi adalah 0,200 lebih besar dari 0,05 (0,200 > 0,05), maka

dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal. Melalui uji linearitas dapat dilihat hasil pengujian data nilai signifikansi diperoleh sebesar 0,678 lebih besar dari 0,05 (0,678 > 0,05), maka dapat disimpulkan terdapat hubungan linear yang signifikan antara kompetensi dan kinerja. Sedangkan dari analisis menggunakan korelasi *pearson* untuk mengukur keeratan hubungan antara kedua variabel tersebut. Besar korelasinya adalah 0,859 (korelasi positif) dengan signifikansi sebesar 0,00, yang berarti kedua variabel ini cukup kuat dan signifikan dari angka sig.(2-tailed) sebesar 0,00 < 0,05. Berarti kompetensi yang lebih baik akan mampu mendorong peegawai memiliki kinerja yang lebih baik.

5.3.3 Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Dari uraian uji t dengan menggunakan program analisa data SPSS ver. 22 maka diketahui bahwa ketiga variabel bebas/independen (X) *signifikan berpengaruh* secara parsial terhadap kinerja pegawai Kabupaten Bulukumba dengan variabel teknologi informasi (X_3) dengan nilai t_{hitung}2.129> t_{tabel} 2.004

Teknologi informasi pada saat ini telah menjadi pilihan utama dalam organisasi yang tangguh dan mampu melahirkan keunggulan kompetitif di tengah persaingan yang semakin ketat. Segala aspek kehidupan telah diwarnai dengan teknologi informasi dimana sudah diketahui bahwa teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja suatu organisasi. Adapun pentingnya peranan

teknologi informasi pada berbagai bidang kehidupan dapat dipahami karena merupakan teknologi yang menitikberatkan pada pengaturan sistem informasi dengan penggunaan komputer.

Saat ini, teknologi informasi merupakan hal yang sangat penting karena sudah banyak organisasi yang mengembangkan dan menerapkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan organisasinya. Penerapan teknologi informasi pada setiap perusahaan atau organisasi dilandasi pada tujuan yang berbeda karena penerapan Teknologi Informasi pada suatu organisasi adalah untuk mendukung kepentingan usahanya. Artinya teknologi informasi yang diterapkan pada setiap organisasi tergantung dari karakteristik organisasi.

Peranan teknologi informasi bagi perusahaan atau organisasi sangatlah penting. Teknologi informasi berperan penting untuk meningkatkan kualitas informasi dan juga sebagai alat bantu maupun strategi yang tangguh untuk mengintegrasikan dan mengolah data dengan cepat dan akurat serta untuk penciptaan produk layanan baru sebagai daya saing untuk menghadapi kompetisi. Selain itu teknologi informasi juga berperan penting bagi organisasi untuk mengefisiensi waktu dan biaya yang secara jangka panjang akan memberikan keuntungan ekonomis yang sangat tinggi.

Wahyuni (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dengan adanya penerapan teknologi informasi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan dapat mempengaruhi tingkat kinerja

karyawan atau dengan kata lain apabila sebuah perusahaan menerapkan teknologi informasi maka dapat meningkatkan kinerja karyawan yang bersangkutan dan sebaliknya jika teknologi informasi tidak diterapkan dengan baik akan membuat kinerja karyawan menurun.

5.3.4 Variabel yang paling dominan berpengaruh

Berdasarkan hasil nilai beta standardized dietahui bahwa variabel-variabel yang meliputi Implementasi SAP, Kompetensi SDM, dan Teknologi Informasi maka yang mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Bulukumba adalah variabel Kompetensi SDM (X_2).

Penelitian ini juga menemukan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R square), dengan nilai koefisien determinasi (R square) sebesar 0,739 yang dapat diartikan bahwa variabel bebas/independen (X) yang meliputi implementasi SAP, kompetensi SDM dan teknologi informasi mempunyai kontribusi terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Bulukumba sebesar 73.9%, sedangkan sisanya sebesar 26.1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Variabel yang dimaksud misalnya kepemimpinan, kompensasi, budaya organisasi, motivasi kerja, komunikasi dan lain sebagainya.

BABVI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Implementasi SAP, Kompetensi SDM dan Informasi Teknologi secara sendiri-sendiri (parsial) terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Bulukumba.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Implementasi SAP, Kompetensi SDM dan Informasi Teknologi secara bersama-sama (simultan) terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Bulukumba.
3. Variabel Kompetensi SDM yang dominan berpengaruh terhadap terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Bulukumba.

6.2 Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pada pegawai di Kabupaten Bulukumba agar dalam penyusunan Laporan Keuangan hendaknya berlandaskan pada Implementasi SAP, Kompetensi SDM dan Teknologi Informasi. Sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah daerah dalam penyusunan

Laporan Kauangan yang relevan, andal, dapat dipahami dan dapat di bandingkan bisa diwujudkan.

2. Kepada tiap SKPD di Kabupaten Bulukumba agar senantiasa memberikan kesempatan yang sama kepada pegawai di unit kerjanya untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan kinerja demi tercapainya tujuan organisasi.
3. Perlu diadakan pengembangan lebih lanjut hasil penelitian ini oleh penelitian lain dengan memperhatikan dan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, agar kualitasnya lebih baik dari tahun ke tahun.

6.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian masih terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan, walaupun penulis telah berupaya semaksimal mungkin dengan berbagai usaha untuk membuat hasil penelitian ini bisa menjadi sempurna. Penulis menyadari bahwa keterbatasan penelitian ini antara lain

Pertama. Penelitian ini hanya membahas faktor-faktor positif yang berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Kuangandi Kabupaten Bulukumba, yaitu Implementasi SAP, Kualitas SDM, dan Informasi Teknologi. Sedangkan secara obyektif masih banyak faktor lain yang mendukung agar Kualitas Laporan Keuangan bisa lebih baik.

Kedua. Walapun penulis sebelum melakukan penelitian telah melakukan serangkaian uji coba untuk mendapatkan instrumen yang valid dan realiabel, namun demikian pengumpulan melalui angket ini masih ada

kelemahankelemahan seperti jawaban yang kurang cermat, responden yang menjawab secara asal-asalan dan tidak jujur, serta pertanyaan yang kurang lengkap.

Ketiga. Sebagai pribadi penulis mempunyai keterbatasan dalam melakukan penelaahan penelitian, pengetahuan yang kurang, literatur yang kurang, waktu dan tenaga yang terbatas. Hal ini merupakan kendala bagi penulis untuk melakukan penyusunan yang mendekati sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Adhi, dan Suhardjo. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kuliatas Laopran Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Tual)". *Jurnal STIE Semarang. Vol. 5, No. 3, Oktober.*

Afriyanti, Meilinda. 2011. *Analisis Pengaruh Current Ratio, Total Asset Turnover, Debt to Equity Ratio, Sales, dan Size terhadap ROA (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2006-2009)*.Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro.

Agustiawan, Nyoman Triyadi dan Ni Ketut Rasmini (2016). "Pengaruh sistem berbasis akrual. Teknologi Informatika dan sistem pengendalian internpemerintah pada kualitas laporan keuangan dengan kompetensi sumberdaya manusia sebagai moderasi"**.** E-Jurnal ekonomi dan bisnisuniversitas Udanaya Vol. 5 No.10

Arfianti, Dita. 2011. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasipelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada satuan kerjaperangkat daerah di kabupaten batang)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bastian, Indra.2010.*Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. PenerbitErlangga :Jakarta

Dadang Suwanda & Hendri Santosa. 2015. *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual. Berpedoman pada SAP.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Dedi Nordiawan. 2012. *Anggaran disuatu pemerintahan.* Jakarta : Salemba Empat.

Edy, Sutrisno. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Penerbit: Jakarta, Kencana.

Efendi, Loli, Darwanis dan Syukriy Abdullah. 2017. Faktor- Faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan daerah (Studi pada satuankerja perangkat kabupaten aceh tengah).*Jurnal Perspektif ekonomidarussalamVolume 3 Nomor 2* Fahmi, Irham. 2013. "*Pengantar Manajemen Keuangan"*. Bandung : Alfabeta.

Harahap, Sofyan Syafri. 2015. *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Edisi 1-10. Jakarta: Rajawali Pers.

Ikatan Akuntansi Indonesia (2012), *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Salemba Empat.

Indra Bastian. (2013). *Sistem Akuntansi Sektor Publik, edisi 3, Jakarta: Salemba Empat. Boediono, dan Wayan, Koster, 2014. Teori dan Aplikasi Statistika dan Probabilitas*. Solo: TB. Bahma.

Indriasih, Dewi. (2014). *The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Intern Control Toward the Quality of Financial Reporting in LocalGoverment.* Research Journal of Finance and Accounting Vol.5, No.20; ISSN: 2222-2847.

Insani, Istyadi. 2010. *Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai Pedoman Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dalam Rangka Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Organisasi Pemerintah.* Penyempurnaan Makalah pada Workshop Manajemen Perkantoran di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informasi Bandung.

Juwita, Rukmi.2013. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.*Trikonomika, Vol.12 No.2.pp.201-214. ISSN 1411-514X*.

Mahaputra dan Putra.2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.*E-jurnal akuntansi Universitas Udayana.ISSN:2302-8556.pp.230-244

Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.

Mahmudi. 2016.*Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah.* Yogyakarta:UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2012). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.*

Rahmawati, dkk.2018. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi (JEBA).Vol.20 No.2.pp.8-27*

Riandani, Riedy. 2017. Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (SKPD Kab.Limapuluh Kota). *Artikel Ilmiah.Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.

Sedarmayanti.2014.*SumberDayaManusiadanProduktivitasKerja*.Jakarta:Mandar Maju.

Sugiyono.2012.*MetodePenelitian Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono.2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutarman. 2012. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sukmaningrum, Tantriani. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi empiris pada pemerintah kabupaten dan kota Semarang). *Skripsi*. Universitas Diponegoro Semarang.

Ubaidah, Tsaniya. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sragen). *Skripsi*: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Wahyuni, Tri. 2018. *Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kemampuan Pengguna Sebagai Variabel Moderasi Pada PD. BPR Bank jombang Kantor Pusat*. Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya.

Wati, Kadek Desiana, Nyoman Trisna Herawati, dan Ni Kadek Sinarwati. 2014.*Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Dan Sistem AkuntansiKeuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*. eJournal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume2 No:1 Tahun 2014).

Winidyaningrum, Celvina, dan Rahmawati. 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan

Variable Intervening Pengendalian Intern Akuntansi: Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten**.** *Simposium Nasional Akuntansi* XII, Purwokerto.

Yusniar, Darwanis, Abdullah Syukriy. 2016. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern Terhadap Good Governance dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan*.Jurnal Akuntansi dan Keuangan. 5 (2), 100-115.

LAMPIRAN

a. Kuesioner

*Berilah tanda Check List (✓) pada kolom pilihan yang tersedia.

Identitas Responden

Nama Responden :

Usia :

No. Telepon/HP :

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Lama Bekerja : ☐ 1-5 tahun ☐ 6-10 tahun ☐ 0 tahun

Pendidikan Terakhir : ☐ SMA ☐ Diploma ☐ Sarjana
☐ Magister ☐ Lainnya

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Pengisian kuesioner dilakukan oleh Kasubbag Anggaran dan Bendahara SKPD Kabupaten Bulukumba.
2. Sebelum menjawab kuesioner, mohon untuk melengkapi identitas responden dengan mengisikan nama, jenis kelamin, usia, nomor telepon, lama bekerja dan pendidikan terakhir.
3. Untuk menjawab kuesioner, Berilah tanda Check List (✓) pada jawaban yang sesuai. Salah satu jawaban yang sesuai pada kolom pilihan jawaban yang tersedia, dengan keterangan sebagai berikut :

   SS : Sangat Setuju

   S : Setuju

   KS : Kurang Setuju

   TS : Tidak Setuju

   STS : Sangat Tidak Setuju
4. Pilih jawaban yang paling sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, setiap pernyataan hanya boleh diisikan satu jawaban.
5. Tidak ada jawaban yang salah. Mohon usahakan agar menjawab setiap pernyataan dengan keyakinan tinggi sehingga tidak mengosongkan satu pun jawaban.

Implementasi SAP (X1)						
No	**Uraian**	**STS**	**TS**	**KS**	**S**	**SS**
1	Laporan keuangan yang saya susun sesuai denga SAP, dengan informasi yang lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.					
2	Laporan keuangan yang saya susun selesai secara tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan saat ini dan pengoreksi keputusan masa lalu (*feedback value*).					
3	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan telah benar dan memenuhi kebutuhan para pengguna dan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu sehingga teruji kebenarannya.					
4	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya sehingga bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.					
5	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang saya susun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					
6	Dalam penyusunan laporan keuangan, saya telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada SAPdari tahun ke tahun.					
7	Laporan yang saya buat disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti dan dipahami.					

8	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangantelah jelas dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuikan dengan batas pemahaman para pengguna.					

Kompetensi SDM (X2)						
No	**Uraian**	**STS**	**TS**	**KS**	**S**	**SS**
1	Saya memiliki tingkat pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan saya dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual pada laporan keuangan.					
2	Saya memiliki pemahaman akuntansi yang sangat baik.					
3	Saya sangat berpengalaman dalam melaksanakan tugas pengimplementasian SAP berbasis akrual pada laporan keuangan.					
4	Saya memiliki profesionalisme yang tinggi ketika melaksanakan pekerjaan dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual pada laporan keuangan.					
5	Saya selalu aktif dalam mengikuti pelatihan-pelatihan pengimplementasian SAP berbasis akrual.					

Teknologi Informasi (X3)						
No	**Uraian**	**STS**	**TS**	**KS**	**S**	**SS**
1	Proses penyusunan Laporan Keuangan di tempat saya bekerja telah tercatat dan terperinci dengan baik.					
2	Laporan Keuangan di SKPD saya telah disimpan dalam satu storage khusus Laporan Keuangan.					

3	Kami dapat mengolah atau memproses Data Laporan keuangan menjadi sebuah informasi keuangan.					
4	Proses pendistribusian Laporan Keuangan tiap bidang telah menggunakan jaringan.					
5	Laporan Keuangan yang telah dibuat disimpan dengan baik sehingga dapat dicari saat dibutuhkan.					
6	Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.					

Kualitas Laporan Keuangan (Y)						
No	**Uraian**	**STS**	**TS**	**KS**	**S**	**SS**
1	Laporan keuangan pada instansi tempat Saya bekerja, telah menyediakan informasi yang dapat mengoreksi aktivitas keuangan di masa lalu.					
2	Pada instansi tempat Saya bekerja, laporan keuangan disajikan dan diterbitkan tepat waktu sesuai periode akuntansi.					
3	Laporan keuangan pada instansi tempat Saya bekerja, telah menghasilkan informasi yang jujur sesuai transaksi yang terjadi dan peristiwa keuangan lainnya yang seharusnya disajikan.					
4	Informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan pada instansi tempat Saya bekerja dapat memenuhi kebutuhan pengguna.					
5	Pada instansi tempat Saya bekerja, informasi laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipahami dengan jelas.					
6	Laporan keuangan pada instansi tempat Saya bekerja telah disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti.					

b. Uji Validitas

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	Implementasi SAP (X1)
X1.1	Pearson Correlation	1	.370**	.296*	.604**	.400**	.365**	.495**	.652**	.689**
	Sig. (2-tailed)		,004	,024	,000	,002	,005	,000	,000	,000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58
X1.2	Pearson Correlation	.370**	1	.538**	.600**	.787**	.499**	.458**	.358**	.747**
	Sig. (2-tailed)	,004		,000	,000	,000	,000	,000	,006	,000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58
X1.3	Pearson Correlation	.296*	.538**	1	.500**	.581**	.785**	.560**	.471**	.776**
	Sig. (2-tailed)	,024	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58
X1.4	Pearson Correlation	.604**	.600**	.500**	1	.686**	.508**	.468**	.412**	.778**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,001	,000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58
X1.5	Pearson Correlation	.400**	.787**	.581**	.686**	1	.650**	.479**	.391**	.812**
	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,000	,000		,000	,000	,002	,000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58
X1.6	Pearson Correlation	.365**	.499**	.785**	.508**	.650**	1	.455**	.458**	.781**
	Sig. (2-tailed)	,005	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58
X1.7	Pearson Correlation	.495**	.458**	.560**	.468**	.479**	.455**	1	.744**	.768**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58
X1.8	Pearson Correlation	.652**	.358**	.471**	.412**	.391**	.458**	.744**	1	.742**
	Sig. (2-tailed)	,000	,006	,000	,001	,002	,000	,000		,000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Implementasi SAP (X1)	Pearson Correlation	.689**	.747**	.776**	.778**	.812**	.781**	.768**	.742**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

NOBEL INDONESIA INSTITUTE

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Kompetensi SDM (X2)
X2.1	Pearson Correlation	1	.817**	.586**	.534**	.490**	.841**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	58	58	58	58	58	58
X2.2	Pearson Correlation	.817**	1	.601**	.545**	.593**	.874**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	58	58	58	58	58	58
X2.3	Pearson Correlation	.586**	.601**	1	.511**	.563**	.780**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	58	58	58	58	58	58
X2.4	Pearson Correlation	.534**	.545**	.511**	1	.570**	.780**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	58	58	58	58	58	58
X2.5	Pearson Correlation	.490**	.593**	.563**	.570**	1	.800**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	58	58	58	58	58	58
Kompetensi SDM (X2)	Pearson Correlation	.841**	.874**	.780**	.780**	.800**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	58	58	58	58	58	58

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

NOBEL
INDONESIA INSTITUTE

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	Teknologi Infotmasi (X3)
X3.1	Pearson Correlation	1	.785**	.648**	.322*	.329*	.275*	.745**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,014	,012	,036	,000
	N	58	58	58	58	58	58	58
X3.2	Pearson Correlation	.785**	1	.631**	.434**	.437**	.489**	.839**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,001	,001	,000	,000
	N	58	58	58	58	58	58	58
X3.3	Pearson Correlation	.648**	.631**	1	.382**	.513**	.485**	.819**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,003	,000	,000	,000
	N	58	58	58	58	58	58	58
X3.4	Pearson Correlation	.322*	.434**	.382**	1	.482**	,247	.644**
	Sig. (2-tailed)	,014	,001	,003		,000	,061	,000
	N	58	58	58	58	58	58	58
X3.5	Pearson Correlation	.329*	.437**	.513**	.482**	1	.425**	.740**
	Sig. (2-tailed)	,012	,001	,000	,000		,001	,000
	N	58	58	58	58	58	58	58
X3.6	Pearson Correlation	.275*	.489**	.485**	,247	.425**	1	.657**
	Sig. (2-tailed)	,036	,000	,000	,061	,001		,000
	N	58	58	58	58	58	58	58
Teknologi Informasi (X3)	Pearson Correlation	.745**	.839**	.819**	.644**	.740**	.657**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	58	58	58	58	58	58	58

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

NOBEL
INDONESIA INSTITUTE

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Kualitas Laporan Keuangan (Y)
Y.1	Pearson Correlation	1	.840**	.629**	.505**	.455**	.600**	.837**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	58	58	58	58	58	58	58
Y.2	Pearson Correlation	.840**	1	.641**	.549**	.528**	.635**	.871**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	58	58	58	58	58	58	58
Y.3	Pearson Correlation	.629**	.641**	1	.519**	.624**	.452**	.812**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	58	58	58	58	58	58	58
Y.4	Pearson Correlation	.505**	.549**	.519**	1	.594**	.542**	.761**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	58	58	58	58	58	58	58
Y.5	Pearson Correlation	.455**	.528**	.624**	.594**	1	.568**	.774**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	58	58	58	58	58	58	58
Y.6	Pearson Correlation	.600**	.635**	.452**	.542**	.568**	1	.776**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	58	58	58	58	58	58	58
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Pearson Correlation	.837**	.871**	.812**	.761**	.774**	.776**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	58	58	58	58	58	58	58

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

NOBEL INDONESIA INSTITUTE

c. Uji Realibilitas

a. Realibilitas Implementasi SAP

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,896	8

b. Realibilitas Kompetensi SDM

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,871	5

c. Realibilitas Teknologi Informasi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,832	6

d. Realibilitas Kualitas Laporan Keuangan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,891	6

NOBEL
INDONESIA INSTITUTE

d. Deskriptif item pertanyaan

Item 1 – Implementasi SAP

X1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	2	3.4	3.4	3.4
	2.00	5	8.6	8.6	12.1
	3.00	17	29.3	29.3	41.4
	4.00	28	48.3	48.3	89.7
	5.00	6	10.3	10.3	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	5.2	5.2	5.2
	3.00	15	25.9	25.9	31.0
	4.00	28	48.3	48.3	79.3
	5.00	12	20.7	20.7	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	7	12.1	12.1	12.1
	3.00	12	20.7	20.7	32.8
	4.00	32	55.2	55.2	87.9
	5.00	7	12.1	12.1	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.7	1.7	1.7
	2.00	2	3.4	3.4	5.2
	3.00	15	25.9	25.9	31.0
	4.00	30	51.7	51.7	82.8
	5.00	10	17.2	17.2	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

NOBEL INDONESIA INSTITUTE

X1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.7	1.7	1.7
	2.00	4	6.9	6.9	8.6
	3.00	10	17.2	17.2	25.9
	4.00	31	53.4	53.4	79.3
	5.00	12	20.7	20.7	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

X1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.7	1.7	1.7
	2.00	8	13.8	13.8	15.5
	3.00	11	19.0	19.0	34.5
	4.00	27	46.6	46.6	81.0
	5.00	11	19.0	19.0	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

X1.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	7	12.1	12.1	12.1
	3.00	18	31.0	31.0	43.1
	4.00	22	37.9	37.9	81.0
	5.00	11	19.0	19.0	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

X1.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	8	13.8	13.8	13.8
	3.00	18	31.0	31.0	44.8
	4.00	24	41.4	41.4	86.2
	5.00	8	13.8	13.8	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

NOBEL
INDONESIA INSTITUTE

Item 2 – Kompetensi SDM

X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	2	3.4	3.4	3.4
	2.00	12	20.7	20.7	24.1
	3.00	14	24.1	24.1	48.3
	4.00	23	39.7	39.7	87.9
	5.00	7	12.1	12.1	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	11	19.0	19.0	19.0
	3.00	13	22.4	22.4	41.4
	4.00	22	37.9	37.9	79.3
	5.00	12	20.7	20.7	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	5	8.6	8.6	8.6
	3.00	12	20.7	20.7	29.3
	4.00	31	53.4	53.4	82.8
	5.00	10	17.2	17.2	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

X2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	3	5.2	5.2	5.2
	2.00	7	12.1	12.1	17.2
	3.00	17	29.3	29.3	46.6
	4.00	23	39.7	39.7	86.2
	5.00	8	13.8	13.8	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

X2.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	4	6.9	6.9	6.9
	2.00	10	17.2	17.2	24.1
	3.00	13	22.4	22.4	46.6
	4.00	23	39.7	39.7	86.2
	5.00	8	13.8	13.8	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

NOBEL INDONESIA INSTITUTE

Item 3 – Teknologi Informasi

X3.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	5.2	5.2	5.2
	3.00	16	27.6	27.6	32.8
	4.00	27	46.6	46.6	79.3
	5.00	12	20.7	20.7	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

X3.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	5.2	5.2	5.2
	3.00	16	27.6	27.6	32.8
	4.00	29	50.0	50.0	82.8
	5.00	10	17.2	17.2	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

X3.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	5.2	5.2	5.2
	3.00	19	32.8	32.8	37.9
	4.00	26	44.8	44.8	82.8
	5.00	10	17.2	17.2	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

X3.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	5.2	5.2	5.2
	3.00	16	27.6	27.6	32.8
	4.00	28	48.3	48.3	81.0
	5.00	11	19.0	19.0	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

NOBEL
INDONESIA INSTITUTE

X3.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.7	1.7	1.7
	2.00	7	12.1	12.1	13.8
	3.00	16	27.6	27.6	41.4
	4.00	23	39.7	39.7	81.0
	5.00	11	19.0	19.0	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

X3.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	4	6.9	6.9	6.9
	3.00	16	27.6	27.6	34.5
	4.00	28	48.3	48.3	82.8
	5.00	10	17.2	17.2	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

NOBEL
INDONESIA INSTITUTE

Item 4 – Kualitas Laporan Keuangan

Y.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.7	1.7	1.7
	2.00	1	1.7	1.7	3.4
	3.00	13	22.4	22.4	25.9
	4.00	27	46.6	46.6	72.4
	5.00	16	27.6	27.6	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

Y.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	3	5.2	5.2	5.2
	3.00	12	20.7	20.7	25.9
	4.00	23	39.7	39.7	65.5
	5.00	20	34.5	34.5	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

Y.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1.00	1	1.7	1.7	1.7
	2.00	5	8.6	8.6	10.3
	3.00	8	13.8	13.8	24.1
	4.00	27	46.6	46.6	70.7
	5.00	17	29.3	29.3	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

Y.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2.00	4	6.9	6.9	6.9
	3.00	20	34.5	34.5	41.4
	4.00	25	43.1	43.1	84.5
	5.00	9	15.5	15.5	100.0
	Total	58	100.0	100.0	

NOBEL
INDONESIA INSTITUTE

e. Data Hasil Uji Statistik SPSS 22

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.860[a]	,739	,725	2,17350

a. Predictors: (Constant), Teknologi Infotmasi (X3), Implementasi SAP (X1), Kompetensi SDM (X2)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	722,485	3	240,828	50,979	.000[b]
	Residual	255,101	54	4,724		
	Total	977,586	57			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

b. Predictors: (Constant), Teknologi Infotmasi (X3), Implementasi SAP (X1), Kompetensi SDM (X2)

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,776	1,984		1,903	,062
	Implementasi SAP (X1)	,194	,086	,255	2,246	,029
	Kompetensi SDM (X2)	,422	,141	,424	2,990	,004
	Teknologi Infotmasi (X3)	,281	,132	,253	2,129	,038

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

NOBEL INDONESIA INSTITUTE

f. Data Tabulasi Variabel

Implementasi SAP (X1)										Kompetensi SDM (X2)						Teknologi Infotmasi (X3)							Kualitas Laporan Keuangan (Y)						
NO	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	Total X1	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total X2	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	Total X3	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Total Y
1	4	4	4	4	4	4	4	4	**32**	4	5	4	5	5	**23**	4	5	4	5	5	5	**28**	4	5	4	5	5	5	**28**
2	4	4	4	4	4	4	4	4	**32**	4	5	4	5	5	**23**	4	5	4	5	5	5	**28**	5	5	4	4	4	5	**27**
3	4	4	5	4	4	5	4	4	**34**	4	4	4	5	4	**21**	5	5	4	4	5	5	**28**	4	5	5	4	5	4	**27**
4	4	5	5	5	5	4	5	4	**37**	4	4	5	5	4	**22**	4	4	4	5	4	4	**25**	5	5	4	4	4	5	**27**
5	4	5	5	4	5	5	5	4	**37**	4	4	4	4	4	**20**	5	4	5	4	5	4	**27**	4	5	5	4	4	4	**26**
6	4	4	4	4	4	4	4	4	**32**	4	4	4	4	4	**20**	4	4	4	4	4	4	**24**	4	4	4	4	4	4	**24**
7	4	4	4	4	4	5	5	4	**34**	4	4	4	4	4	**20**	4	4	4	4	4	4	**24**	4	4	4	4	4	4	**24**
8	4	4	4	4	4	4	4	4	**32**	4	4	4	4	4	**20**	4	4	4	4	4	4	**24**	4	4	4	4	4	4	**24**
9	4	4	4	4	4	4	4	4	**32**	2	3	3	3	4	**15**	4	4	4	2	4	5	**23**	4	4	4	4	4	4	**24**
10	1	3	4	3	3	1	4	3	**22**	2	2	4	1	3	**12**	3	4	2	4	4	3	**20**	3	4	1	2	2	3	**15**
11	4	4	4	5	4	5	5	5	**36**	3	4	4	4	3	**18**	4	4	4	4	3	3	**22**	4	3	4	4	4	4	**23**
12	4	5	5	4	5	4	5	4	**36**	4	4	5	5	4	**22**	4	5	4	5	4	4	**26**	3	5	5	5	5	5	**28**
13	4	4	4	4	4	4	4	4	**32**	4	4	4	4	4	**20**	4	4	4	4	4	4	**24**	5	5	4	4	5	5	**28**
14	4	4	4	4	4	4	4	3	**31**	3	4	4	4	3	**18**	4	4	4	4	3	3	**22**	3	3	2	3	3	3	**17**
15	3	3	2	1	1	2	2	3	**17**	3	2	3	1	2	**11**	5	3	3	3	3	2	**19**	1	2	4	2	4	2	**15**
16	5	5	4	5	5	5	5	5	**39**	5	5	4	5	4	**23**	4	4	5	5	4	4	**26**	4	4	5	5	4	4	**26**
17	4	3	4	4	4	4	3	4	**30**	4	4	4	3	4	**19**	4	4	4	3	4	4	**23**	5	5	5	3	5	5	**28**
18	5	3	4	5	4	4	3	4	**32**	4	5	4	3	4	**20**	5	4	5	3	4	4	**25**	5	5	5	3	5	5	**28**
19	4	3	4	4	4	4	4	4	**31**	4	4	4	3	3	**18**	4	4	4	3	3	3	**21**	3	4	3	3	4	3	**20**
20	3	4	4	4	2	2	2	2	**23**	3	3	3	3	3	**15**	3	2	3	4	4	2	**18**	3	3	2	3	2	3	**16**

NOBEL
INDONESIA INSTITUTE

21	2	4	4	4	5	5	2	2	**28**	2	2	3	4	5	**16**	5	4	3	5	3	4	**24**	5	5	4	5	5	4	**28**
22	4	5	5	5	4	5	5	5	**38**	4	5	4	4	4	**21**	4	3	4	4	3	4	**22**	5	5	5	5	5	5	**30**
23	1	5	4	5	5	4	3	2	**29**	2	5	5	4	5	**21**	3	3	5	4	3	4	**22**	5	5	5	4	5	5	**29**
24	3	3	4	4	5	5	3	3	**30**	3	3	4	4	4	**18**	5	4	3	5	3	2	**22**	3	2	4	3	5	3	**20**
25	3	4	4	4	4	5	3	3	**30**	3	3	4	3	2	**15**	3	4	3	4	3	3	**20**	4	3	2	3	3	4	**19**
26	2	5	3	4	4	4	2	2	**26**	2	2	5	4	4	**17**	4	4	3	3	2	3	**19**	4	3	5	3	3	3	**21**
27	4	4	4	4	4	4	4	4	**32**	2	2	3	1	1	**9**	3	3	3	3	2	3	**17**	3	3	3	3	3	2	**17**
28	4	5	5	4	5	5	4	5	**37**	5	5	5	4	5	**24**	5	5	5	5	5	5	**30**	5	5	5	5	5	4	**29**
29	3	3	4	3	3	4	4	4	**28**	4	4	4	3	3	**18**	3	3	3	3	4	3	**19**	4	4	4	4	3	4	**23**
30	3	4	2	3	4	2	3	3	**24**	3	4	2	3	1	**13**	4	4	3	2	2	3	**18**	4	4	2	3	4	3	**20**
31	2	2	2	3	2	2	4	2	**19**	2	2	2	3	1	**10**	3	3	3	3	1	3	**16**	3	3	3	2	2	4	**17**
32	3	4	4	3	4	4	4	3	**29**	5	5	4	4	4	**22**	4	4	4	4	5	4	**25**	5	5	5	3	4	4	**26**
33	3	3	4	3	3	4	3	4	**27**	3	3	4	3	2	**15**	4	4	3	4	3	3	**21**	4	4	4	4	4	4	**24**
34	3	3	3	3	3	3	3	3	**24**	3	3	3	2	2	**13**	2	3	3	4	4	4	**20**	4	4	4	3	4	2	**21**
35	2	3	2	2	3	2	2	3	**19**	2	3	4	2	4	**15**	4	4	4	4	4	5	**25**	3	3	3	3	4	4	**20**
36	3	3	3	3	3	3	2	2	**22**	2	2	3	3	2	**12**	3	3	3	3	2	4	**18**	3	3	3	3	3	3	**18**
37	3	3	3	3	3	3	4	4	**26**	4	4	3	2	4	**17**	5	5	5	4	4	4	**27**	4	4	4	4	4	4	**24**
38	4	5	4	4	5	4	4	3	**33**	3	3	4	4	1	**15**	4	4	4	4	5	4	**25**	4	4	4	4	4	4	**24**
39	4	4	3	4	4	3	3	4	**29**	4	4	4	3	4	**19**	3	3	3	4	4	4	**21**	4	4	4	4	4	3	**23**
40	3	3	3	3	3	3	3	3	**24**	3	2	2	4	3	**14**	4	4	4	4	4	4	**24**	3	3	3	4	4	4	**21**
41	4	4	2	4	4	2	3	3	**26**	2	2	3	4	3	**14**	3	3	3	3	3	3	**18**	4	4	4	3	3	3	**21**
42	4	4	3	4	4	3	4	3	**29**	3	3	4	4	2	**16**	4	4	4	3	2	4	**21**	4	4	4	4	4	3	**23**
43	3	2	3	3	2	3	3	3	**22**	3	3	4	3	2	**15**	3	3	3	3	3	4	**19**	3	3	3	4	4	3	**20**
44	5	5	5	5	5	5	5	5	**40**	5	5	5	5	5	**25**	5	5	5	5	5	5	**30**	5	5	5	5	5	5	**30**

NOBEL
INDONESIA INSTITUTE

45	4	4	4	4	4	4	5	5	**34**	4	4	4	4	5	**21**	4	4	4	5	4	5	**26**	5	5	5	5	4	4	**28**
46	5	5	3	5	5	3	3	4	**33**	5	5	5	5	4	**24**	3	3	4	4	5	5	**24**	5	5	5	3	4	4	**26**
47	3	4	4	3	4	4	4	3	**29**	1	3	3	2	3	**12**	3	3	3	4	3	4	**20**	4	4	4	4	3	3	**22**
48	2	4	4	2	4	4	3	3	**26**	2	2	3	3	3	**13**	3	3	2	3	2	4	**17**	4	4	4	3	3	3	**21**
49	5	4	4	5	4	4	4	4	**34**	5	5	5	4	4	**23**	5	5	5	3	5	4	**27**	5	5	5	4	4	4	**27**
50	3	3	4	3	3	4	3	4	**27**	3	3	4	3	3	**16**	2	2	3	4	3	2	**16**	3	3	3	3	4	4	**20**
51	4	4	3	4	4	3	3	3	**28**	4	4	3	4	4	**19**	3	3	4	4	4	3	**21**	4	4	4	4	3	3	**22**
52	4	4	4	4	4	4	3	2	**29**	4	4	4	2	3	**17**	4	4	4	3	2	5	**22**	4	4	4	3	4	3	**22**
53	4	4	4	4	4	4	4	4	**32**	4	4	4	3	3	**18**	4	4	4	4	4	4	**24**	4	4	4	4	4	4	**24**
54	4	4	3	4	4	3	5	5	**32**	4	4	5	4	4	**21**	5	5	5	4	4	4	**27**	5	5	5	4	4	4	**27**
55	5	5	4	5	5	4	5	5	**38**	5	5	5	4	5	**24**	5	5	5	5	5	3	**28**	5	5	5	5	5	4	**29**
56	4	3	2	4	3	2	3	3	**24**	2	3	2	2	2	**11**	2	2	2	2	4	3	**15**	4	4	4	2	3	3	**20**
57	3	2	2	3	2	2	2	2	**18**	1	2	2	2	2	**9**	3	3	3	3	3	3	**18**	2	2	2	3	3	3	**15**
58	3	4	3	3	4	3	4	4	**28**	4	4	4	3	2	**17**	4	4	4	4	3	4	**23**	4	4	4	4	4	4	**24**

NOBEL
INDONESIA INSTITUTE